LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN



2025

#bangga melayani bangsa

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

0812-2034-4134
info@pn-jakartatimur.go.id
pn-jakartatimur.go.id

PINTAR

PENGANTAR KETUA
A WORD FROM THE CHAIR



Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat-Nya sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus dapat menyelesaikan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan di tahun 2025.

Adalah suatu keniscayaan menjalankan tugas pokok memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara sebagai *core business* utama menjadi tanggung jawab bersama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan, dengan 7 (tujuh) prinsip-prinsip utama Mahkamah Agung.

Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas tersebut maka dalam Laporan Kegiatan Tahun 2025 ini kami sajikan informasi tentang keadaan perkara, penyelesaian perkara, program prioritas nasional, sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, sarana prasarana, teknologi informasi, pelayanan publik, dan Pengawasan.

Capaian prestasi yang telah diraih di tahun 2025 adalah merupakan hasil usaha setiap unsur yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus, dan atas capaian tersebut Pimpinan menyampaikan terima kasih kepada seluruh Hakim, Para Pejabat Struktural, Fungsional, Pegawai, PPPK, dan Tenaga honorer Non DIPA atas sumbangsihnya dalam memajukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus.

Akhirnya Kami berharap Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi kinerja organisasi di tahun berikutnya, dan bermanfaat sebagai sumber informasi bagi masyarakat, dan semua pihak yang membutuhkan.

Jakarta, 26 Januari 2026

Ketua

Iwan Anggoro Warsita

DAFTAR ISI
TABLE OF CONTENT

PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
PROFIL iv
KALEIDOSKOP viii
PRESTASI xvii

BAB I PENDAHULUAN 1

BAB II 2

A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR 5

- Keadaan Perkara Tingkat Pertama 7
- Keadaan Perkara Tingkat Banding 8
- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi 8
- Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali 8

B. PENYELESAIAN PERKARA

- Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu 9
- Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) 10
- Perkara yang Berhasil Diselesaikan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif 10
- Pekara yang Berhasil Diselesaikan melalui Mediasi 10
- Perkara Anak yang berhasil Diselesaikan melalui Diversi 10
- Perkara Perdata yang menggunakan e-Court 11
- Perkara Pidana yang Dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu 11
- Layanan Perkara Pidana yang Diajukan secara elektronik (e-Berpadu) 11

C. CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL 9

- Posbakum (Satker yang mendapat alokasi dan realisasi anggaran) 11
- Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu 13
- Perkara prodeo (pembebasan biaya perkara) 13

BAB III 14

SUMBER DAYA MANUSIA

KOMPOSISI SUMBERDAYA MANUSIA BERDASARKAN 22
KEPANGKATAN/ GOLONGAN/ PENDIDIKAN 19

A. Komposisi Pegawai 19
B. Mutasi 23
C. Promosi 24
D. Pensiun 25
E. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang Telah Mengikuti Diklat 26

BAB IV 33

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA,
DAN TEKNOLOGI INFORMASI 39

A. Pengelolaan Keuangan 39
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana 39
C. Pengelolaan Teknologi Informasi 47

BAB V 52

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK 57

A. Indeks Kepuasan Pengguna
Layanan Pengadilan 57
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 59
C. Inovasi Pelayanan Publik 63

BAB VI 68

PENGAWASAN 71

A. Internal 71
B. Evaluasi 75

BAB VII 79

PENUTUP 80

A. Kesimpulan 80
B. Rekomendasi 80



PROFIL PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR



PROFIL PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR KELAS IA KHUSUS

VISI :

"TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR KELAS IA KHUSUS YANG AGUNG "

MISI :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus.

TUJUAN :

1. Memenuhi kebutuhan Masyarakat terhadap sistem peradilan .
2. Penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi
3. Kemudahan akses pelayanan peradilan bagi Masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatkan kepatuhan Masyarakat akan putusan Pengadilan.

TUJUAN TAMBAHAN :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana.
2. Meningkatkan mutu sistem manajamen administrasi organisasi.
3. Menjadi unit kerja yang berhasil dalam menciptakan birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

SASARAN STRATEGIS RENSTRA :

1. Terwujudnya kepercayaan Masyarakat terhadap system peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi Masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya kepatuhan Masyarakat terhadap putusan Pengadilan.

WAJAH PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR KELAS IA KHUSUS

DARI TAHUN KE TAHUN



TAHUN 1981

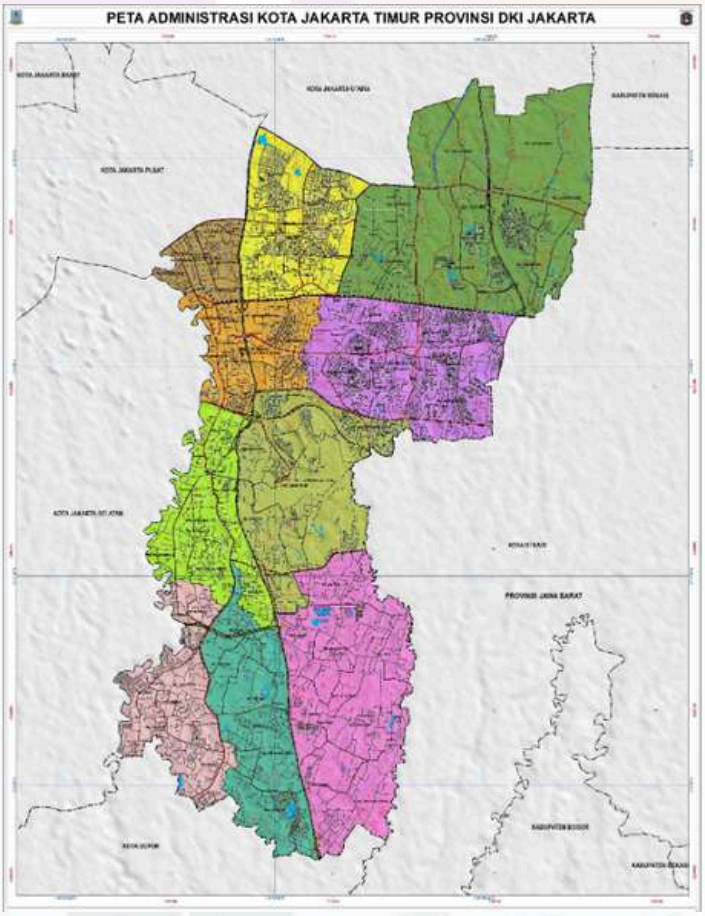


TAHUN 1990-an



TAHUN 2011
s/d
Sekarang

WILAYAH YURISDIKSI :



MOTTO :

PINTAR

Profesional Inovatif Nyaman Akuntabel Transparan Ramah

Profesional	:	Mampu menempatkan diri, menyelesaikan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab , tepat waktu dan memiliki nilai integritas,
Inovatif	:	Mampu menyelesaikan masalah dengan menemukan solusi yang baru, dan berbeda.
Nyaman	:	Mampu menciptakan kondisi yang aman, dan tenang.
Transparan	:	Bersikap terbuka dalam memberikan informasi.
Akuntabel	:	Bertanggungjawab atas pengelolaan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan.
Ramah	:	Bersikap secara baik. Baik dalam tutur kata dan menyenangkan dalam pelayanan.

KALEIDOSKOP TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR



KALEIDOSKOP TAHUN 2025

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA PN JAKARTA TIMUR & YLBHAS

6 Januari 2025,

Mengawali kegiatan tahun 2025, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menandatangani Nota Kesepahaman Bersama dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Syariah dalam rangka menyediakan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi pencari keadilan yang kurang mampu untuk dapat berkonsultasi hukum tanpa dipungut biaya.





PEMBACAAN DAN PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS

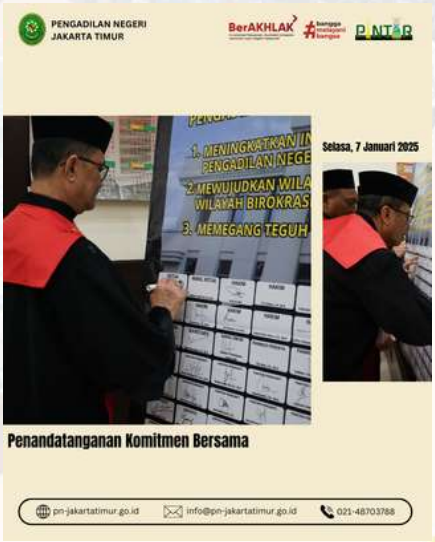
7 Januari 2025,

Mengawali kegiatan tahun 2025 sebagai wujud komitmen bersama dalam menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh integritas maka dilakukan kegiatan pembacaan dan penandatangan Pakta Integritas oleh seluruh unsur pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus.

PENANDATANGANAN KOMITMEN BERSAMA

7 Januari 2025,

Penandatanganan komitmen bersama dilaksanakan sebagai simbol integritas dan tanggung jawab seluruh unsur pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus. Kegiatan tersebut dipimpin dan diawali oleh Ketua, Bapak Ikhwan Hendrato, S.H., M.H kemudian dilanjutkan oleh seluruh aparatur Pengadilan Negeri Jakarta Timur.





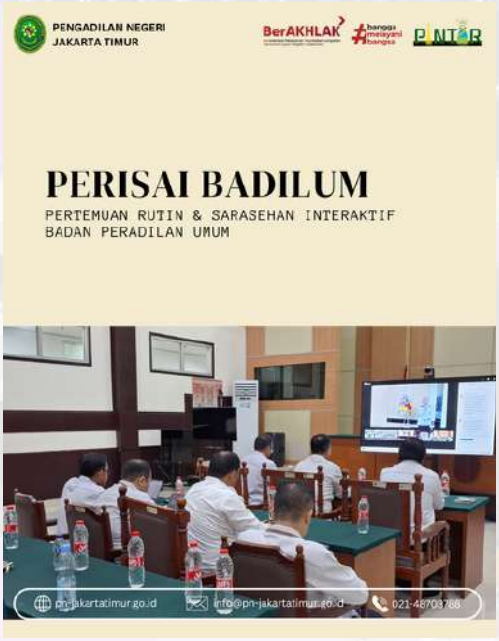
DIKLAT DI TEMPAT KERJA (DDTK) SOSIALISASI DAN SIMULASI APLIKASI SISTEM INFORMASI BANK DATA (SIMBADA)

10 Januari 2025,
Sosialisasi aplikasi Sistem Informasi Bank Data (SIMBADA) PN Jakarta Timur oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan beserta staf. Pada sosialisasi ini dilakukan pengenalan dan simulasi penggunaan aplikasi SIMBADA.

DIKLAT DI TEMPAT KERJA (DDTK) SOSIALISASI PENGISIAN SPT

17 Januari 2025,
Sosialisasi pengisian SPT bagi aparatur Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan narasumber Husnul Khotimah, S.I.A selaku Bendahara Pengeluaran. Pada sosialisasi ini dilakukan simulasi langsung pengisian SPT yang dapat diikuti langsung pengisiannya oleh peserta sosialisasi.





PERTEMUAN RUTIN & SARASEHAN INTERAKTIF (PERISAI) BADILUM

17 Januari 2025,
Ketua, Wakil Ketua, Hakim dan Panitera mengikuti kegiatan Pertemuan Rutin & Sarasehan Interaktif (PERISAI) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dengan Bapak Bambang Myanto, S.H.,M.H selaku narasumber. Salah satu pesan yang disampaikan yaitu “Kinerja yang berkualitas tidak secara otomatis dan natural terbentuk, melainkan hasil dari upaya yang cerdas dan berintegritas, inovatif, sistematis, dan terus-menerus”.



RAPAT TINJAUAN KINERJA JANUARI 2025

21 Januari 2025,
Sebagai langkah refleksi dan mengawali evaluasi di awal tahun 2025, diadakan rapat tinjauan kinerja yang dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua. Pada rapat tersebut dilakukan pula sosialisasi terhadap Perma No. 7, 8, dan 9 tahun 2016 mengenai kode etik dan pedoman perilaku aparatur peradilan agar tetap selalu mengedepankan integritas, kinerja yang efektif, dan pelayanan yang optimal.

STUDI TIRU PEMBAYARAN SECARA NON TUNAI (*CASHLESS*)

22 Januari 2025,
Demi meningkatkan layanan di era digitalisasi saat ini khususnya terkait pelayanan segala pembayaran, para panitera muda, kasir dan staf kepaniteraan melakukan studi tiru terkait sistem pembayaran secara non tunai (*cashless*) pada Pengadilan Negeri Bandung agar transaksi pembayaran menjadi lebih mudah, cepat, dan aman bagi semua pihak.





PENYERAHAN PIAGAM DAN PLAKAT PELAPORAN SPT (LEBIH AWAL)

31 Januari 2025,
KPP Pratama Cakung memberikan plakat sebagai bentuk apresiasi telah dilaksanakannya pelaporan SPT (lebih awal) oleh aparatur Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selain itu, diserahkan pula piagam untuk KPP Pratama Cakung sebagai bentuk apresiasi telah mensosialisasikan sekaligus melakukan simulasi langsung pengisian SPT.



RAPAT KOORDINASI & EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)

11 Februari 2025,

Dirjen Badilum mengadakan rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI) Tahun 2025 secara virtual melalui aplikasi zoom yang diikuti oleh Ketua, Wakil, Para Hakim, Pejabat Struktural, dan beberapa staf Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang membahas fokus evaluasi ZI serta dokumen-dokumen syarat utama yang harus disiapkan untuk diupload pada aplikasi PMPZI Mahkamah Agung.

SKRINING KESEHATAN

14 Februari 2025,

Telah diadakan kegiatan skrining kesehatan bagi seluruh warga Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang bekerja sama Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur dan Puskesmas Cakung. Setelah selesai, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan piagam dan plakat sebagai bentuk apresiasi telah suksesnya penyelenggaraan skrining kesehatan tersebut.





KUNJUNGAN FEDERAL CIRCUIT AND FAMILY COURT OF AUSTRALIA (FCFCOA)

21 Februari 2025,

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang diwakili oleh Wakil Ketua dan Hakim secara virtual melalui Zoom menghadiri kunjungan FCFCOA ke Dirjen Badilum dalam rangka diskusi pertukaran pengetahuan secara rutin melalui dialog yudisial dengan tema Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Perkara Dispensasi Kawin dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Perkara Perceraian



SOSIALISASI SAKIP 2025

24 Februari 2025,
Pengadilan Negeri Jakarta Timur diwakili oleh Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris, Hakim, Kabag dan Kasubbag menghadiri kegiatan sosialisasi SAKIP yang dilaksanakan secara virtual melalui zoom. Pada kegiatan ini disampaikan rancangan sasaran strategis pada rencana strategis (renstra) Mahkamah Agung 2025-2029.

INTERNALISASI E-LITIGASI

25 Februari 2025,
Dalam rangka monitoring dan evaluasi administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, diadakan sosialisasi oleh Ketua diikuti oleh Wakil Ketua, Para Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti, Panmud, dan Staf Kepaniteraan. Dalam sosialisasi ini dipaparkan PERMA 7 Tahun 2022 jo SEMA 1 Tahun 2023 jis SK KMA 363/KMA/SK/XII/2022.





MUSYAWARAH CABANG (MUSCAB) IKAHI JAKARTA TIMUR

28 Februari 2025,
Telah dilaksanakan musyawarah cabang Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) cabang Jakarta Timur di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kegiatan muscab ini sekaligus diadakan pembentukan pengurus baru IKAHI cabang Jakarta Timur yang dihadiri oleh perwakilan dari Pengadilan Agama Jakarta Timur, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Militer II - 08 Jakarta.

MARET








Sosialisasi SK Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12/BP/SK.PW1/II/2025 tentang Penunjukan Satuan Kerja Pelaksana Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Tahun 2025
Dan Nomor 15/BP/SK.PW1/III/2025, tentang Penunjukan Kepaniteraan Mahkamah Agung RI sebagai Pelaksana Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Tahun 2025 (pada tahap pembangunan).









KEGIATAN

- RAPAT PENYUSUNAN RENCANA KERJA ZI 2025
- PENCANANGAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)
- TINJAUAN KINERJA MARET 2025
- *PUBLIC CAMPAIGN* ZONA INTEGRITAS (ZI)
- PENILAIAN MANDIRI ZONA INTEGRITAS (ZI)
- RAPAT SOP KEPANITERAAN 2025
- RAPAT KOORDINASI PENEGAKAN HUKUM TPPU
- PERISAI BADILUM EPISODE 4 DAN 5

APRIL-MEI

















KEGIATAN

- RAPAT KHUSUS BAGI HAKIM
- TINJAUAN KINERJA APRIL 2025
- PENGAWASAN VIRTUAL PT JAKARTA APRIL 2025
- *PEACE MAKER JUSTICE AWARD 2025*
- PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN & PELANTIKAN PNS
- PENYULUHAN KESADARAN HUKUM KELUARGA
- PENGAWASAN VIRTUAL PT JAKARTA MEI 2025

JUNI - JULI

















KEGIATAN

- SOSIALISASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENERAPAN POLA HIDUP SEDERHANA
- PENANDATANGANAN PKS MAGANG DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASILA
- DDTK PENINGKATAN INTEGRITAS DAN KINERJA APARATUR PENGADILAN
- PENGAWASAN REGULER PT JAKARTA SEMESTER 1 DAN PENDAMPINGAN AMPUH 2025
- PELAKSANAAN ASESMEN AMPUH 2025 OLEH DITJEN BADILUM

JULI - AGUSTUS

















KEGIATAN

- TINJAUAN KINERJA JULI 2025
- SOSIALISASI PENERAPAN APLIKASI KIBANA
- SOSIALISASI PENERAPAN ECOURT BAGI PETUGAS PTSP
- PELATIHAN PELAYANAN PRIMA BAGI PETUGAS PTSP
- EVALUASI KINERJA PPNPN DAN PTT
- SOSIALISASI DAN PRA AUDIT SISTEM PENGAMANAN SESUAI PERATURAN BNPT NOMOR 3 TAHUN 2020
- PEMBINAAN HAKIM DAN PANITERA PENGGANTI
- UPACARA PERINGATAN HUT RI KE-80

AGUSTUS - SEPTEMBER

















KEGIATAN

- UPACARA PERINGATAN HUT MAHKAMAH AGUNG KE-80
- ACARA MEMERIAHKAN HUT RI DAN HUT MAHKAMAH AGUNG KE-80
- TINJAUAN KINERJA AGUSTUS 2025
- WISUDA PURNABAKTI BAPAK COKORDA GEDE ARTHANA
- PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN PPPK
- PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN PANMUD PIDANA
- PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA
- PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN JURUSITA

SEPTEMBER - OKTOBER

















KEGIATAN

- TINJAUAN KINERJA SEPTEMBER 2025
- PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN PANMUD PERDATA
- PERPISAHAN DALAM RANGKA PROMOSI KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR
- PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR
- EDUKASI HUKUM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
- *MEDICAL CHECK-UP* BAGI HAKIM
- TINJAUAN KINERJA OKTOBER 2025

NOVEMBER - DESEMBER















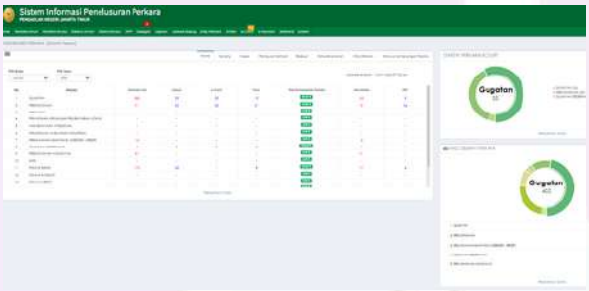


KEGIATAN

- PELAYANAN RAMAH DISABILITAS
- PELAKSANAAN PENILAIAN PIPK TAHUN 2025
- PRESENTASI E-MONEV KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025
- TINJAUAN KINERJA NOVEMBER 2025
- PENGAWASAN DAERAH DAN PEMBINAAN SEMESTER II OLEH PT JAKARTA
- PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN PANITERA
- KUNJUNGAN SIDAK KETUA PT JAKARTA
- PENERIMAAN ANUGERAH KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PREDIKAT "INFORMATIF"

PENERAPAN
SISTEM PERKANTORAN BERBASIS ELETRONIK (SPBE)
Demi Peningkatan Kinerja Utama Organisasi

Aplikasi SIPP



Aplikasi E-Court



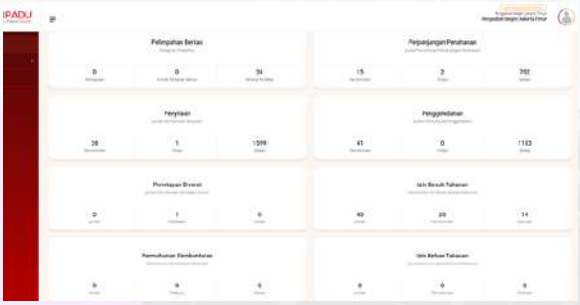
Aplikasi Eraterang



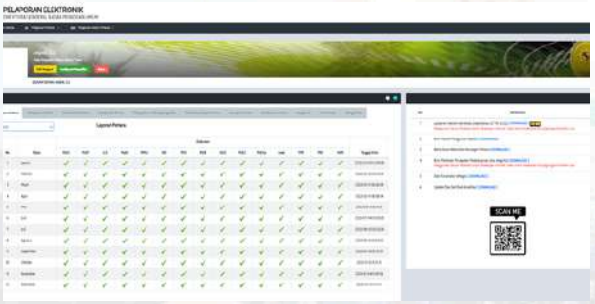
Aplikasi PTSP+



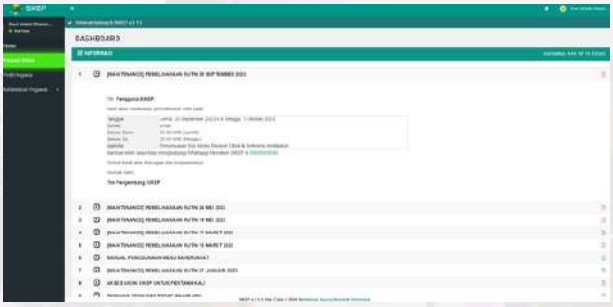
Aplikasi E-Berpadu



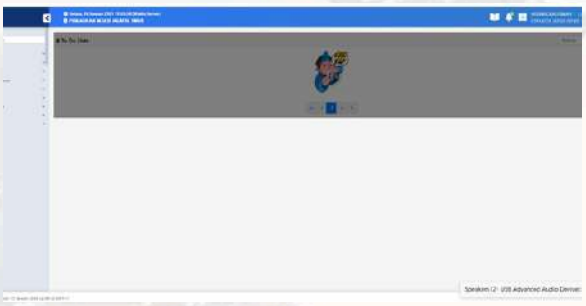
Aplikasi Pelaporan Elektronik



Aplikasi SIKEP

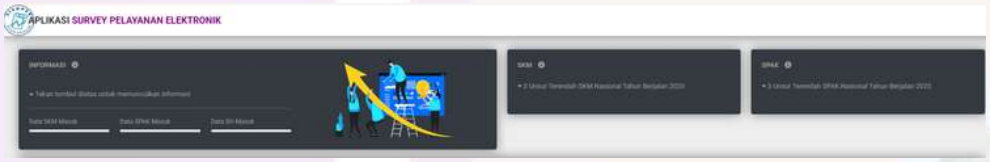


Aplikasi SAKTI

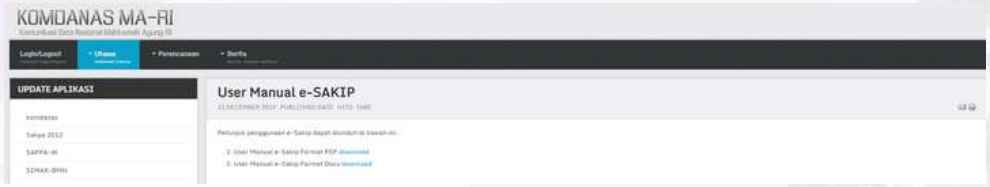


PENERAPAN
SISTEM PERKANTORAN BERBASIS ELETRONIK (SPBE)
Demi Peningkatan Kinerja Utama Organisasi

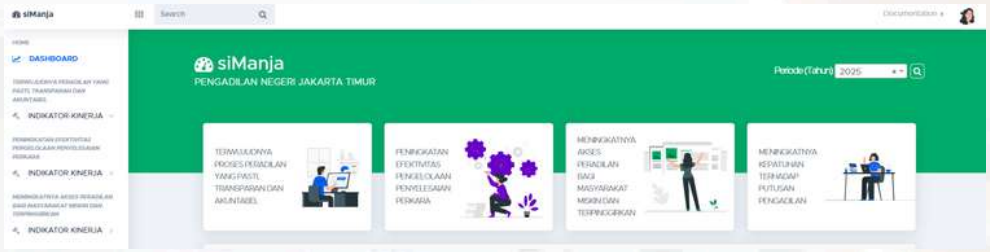
Aplikasi Si Super



Aplikasi Komdanas



Aplikasi SiManja



Aplikasi E-Iplans



PENERAPAN
SISTEM PERKANTORAN BERBASIS ELETRONIK (SPBE)
Demi Peningkatan Kinerja Utama Organisasi

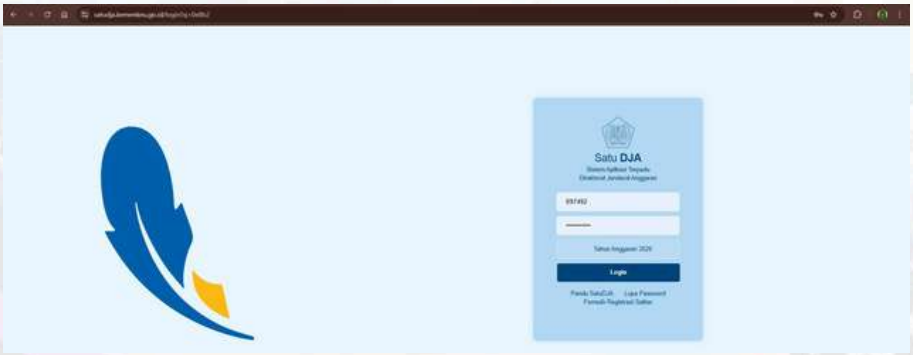
Aplikasi e-Monev



Aplikasi OM-SPAN



Aplikasi Satu DJA



Aplikasi Monev Kemenkeu



PRESTASI PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR



PRESTASI 2025



ANUGERAH
Keterbukaan Informasi Publik
Tahun 2025
dari Komisi Informasi
Provinsi DKI Jakarta
sebagai
Badan Publik "INFORMATIF"

]='{

TERBAIK IV
Penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2025
Kategori Pengadilan Negeri Kelas IA dan IA Khusus
oleh
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum



BAB I
PENDAHULUAN



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang masuk di tingkat pertama (Pasal 50 Undang-undang No. 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2004, dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009). Selain tugas pokok tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus mempunyai fungsi sebagai berikut:

- **Fungsi mengadili (*judicial power*)** yakni menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
- **Fungsi pembinaan** yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi perencanaan/teknologi informasi, umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.
- **Fungsi pengawasan** yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti dibawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
- **Fungsi nasehat** yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
- **Fungsi administratif** yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan) dan administrasi umum (perencanaan/teknologi informasi/pelaporan, kepegawaian/organisasi/tatalaksana dan keuangan/umum/ perlengkapan)
- **Fungsi lainnya** antara lain melaksanakan Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan .

Program dan kegiatan yang telah dijalankan di tahun 2025 dipastikan telah sejalan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus. Diantara program dan kegiatan tersebut adalah :

- Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya melalui DIPA 01 Badan Urusan Administrasi untuk layanan umum dan layanan perkantoran yang berupa pembinaan, pembayaran gaji, dan belanja operasional.
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung melalui DIPA 01 Badan Urusan Administrasi yang dimanfaatkan untuk menunjang pelaksanaan tugas dengan melakukan pengadaan sarana dan prasarana printer, pengadaan alat penyimpan data/harddisk dan pemeliharaan sarana pendukung.
- Peningkatan transparansi peradilan dan publikasi informasi perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Penulusuran Perkara (SIPP), peningkatan pengelolaan website, akun media sosial, dan layanan meja informasi di Pengadilan dengan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/I/2022, tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

- Penguatan produktivitas penyelesaian perkara dengan mereviu Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 tahun 2014, Tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding paling lama 3 (tiga) bulan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.
- Peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materiil, untuk meningkatkan kualitas putusan yang dibuat oleh hakim akan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencarai keadilan.
- Peningkatan fungsi pengawasan dan penanganan pengaduan untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan mengacu pada Perma No. 7 tahun 2016, Perma No. 8 Tahun 2026, dan Perma No. 9 tahun 2016, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 076/ KMA/SK/VI/2009, tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga peradilan.
- Peningkatan pelayanan publik melalui program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh atau AMPUH (Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 142/DJU/SK.OT1.6/II/2024, tanggal 13 Februari 2024) yang dahulu dikenal dengan nama Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum yang dibentuk Ditjen Badilum ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat padasaat ini danuntuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul (Indonesian Court PerformanceExcellent/ICPE). Adapun kriteria penilaian yangdigunakan meliputi tujuharea yaitu: 1)Kepemimpinan (leadership); 2) Perencanaan Strategis(strategic planning); 3)Fokus Pelanggan (customer focus); 4) Sistem Dokumentasi (document system);5) Manajemen SumberDaya (resource management); 6) Manajemen Proses (process management); dan 7) Hasil Kinerja (performance results).
- *One day publish,* yaitu menayangkan putusan secara cepat, dengan mengupload putusan ke web 1 hari setelah diputus sesuai maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang one day publish, sehingga putusan dapat diakses secara online oleh masyarakat.
- *One day minute,* yaitu percepatan minutasi terhadap berkas-berkas perkara permohonan yang telah diputus.
- Peningkatan pengiriman salinan putusan ke para pihak secara tepat waktu.
- Pembebasan biaya perkara (prodeo) bagi masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus yang tidak mampu untuk berpekara. Strategi yang ditempuh agar kebijakan ini dapat terwujud adalah dengan meningkatkan sosialisasi adanya program ini melalui media sosial.
- Pemberian layanan melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu. Program ini menyediakan layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara.
- Kepatuhan terhadap isi putusan pengadilan bukan hal yang mudah untuk dipenuhi karena sangat bergantung pada kesediaan pihak yang dihukum. Hal inilah yang mengakibatkan pelaksanaan putusan pengadilan terkadang harus dilakukan dengan upaya paksa melalui eksekusi. Salah satu strategi yang dilakukan untuk memenuhi hal tersebut adalah memastikan setiap permohonan eksekusi yang diajukan segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan (percepatan tindak lanjut atas permohonan eksekusi).

Selanjutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan seluruh program dan kegiatan sebagaimana diuraikan diatas maka perlu dituangkan dalam sebuah laporan. Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah sumber informasi atas hasil pencapaian Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus di tahun 2025. keandalan dari informasi yang terkandung didalamnya menjadi sangat penting untuk mengungkapkan kualitas dari sebuah instansi pemerintah.

Laporan Kegiatan Tahun 2025 ini adalah wujud transparansi dan akuntabilitas manajemen Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus kepada seluruh stakeholder. Harapannya Laporan ini mampu meyakinkan stakeholder bahwa kegiatan pengelolaan yang dilakukan oleh manajemen telah memenuhi kebutuhan dan kepentingan mereka. Harapan lainnya adalah semoga laporan ini memberikan pembuktian bahwa sebagai lembaga penyelenggara layanan publik bidang hukum, Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus telah mampu untuk menciptakan budaya kerja yang profesional, transparan, efisein, efektif, dan akuntabel.

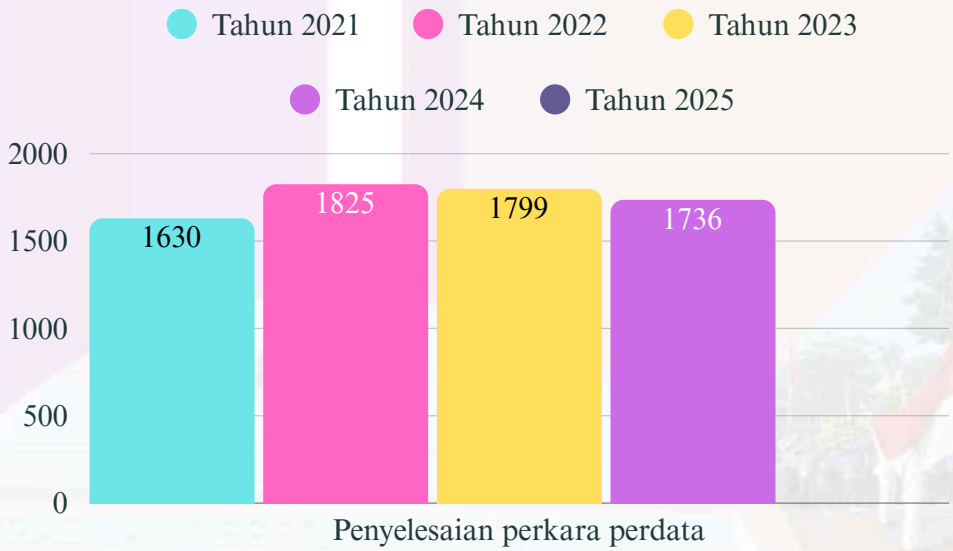


BAB II
KEADAAN PERKARA
PENGADILAN NGERI JAKARTA TIMUR
KELAS IA KHUSUS

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

TAHUN 2025

RINGKASAN KINERJA
Performance Summary



Penyelesaian perkara perdata



Penyelesaian perkara pidana

Ringkasan kinerja/*performance summary* yang disajikan adalah ringkasan kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun Rencana Strategis (Renstra) organisasi sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Berdasarkan gambaran diatas diketahui bahwa rata-rata penyelesaian perkara perdata dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir Renstra cenderung tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Berbeda halnya dengan penyelesaian perkara pidana. Penyelesaian perkara tahun 2025 jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021 s/d tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh perbedaan jumlah perkara pidana yang masuk di tahun 2025 jauh lebih banyak dari tahun 2021 s/d tahun 2024.

BAB II
KEADAAN PERKARA

A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR

Selama tahun 2025, Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus telah berhasil menyelesaikan 124.505 perkara pidana dari 124.488 perkara pidana yang masuk ditambah sisa perkara tahun 2024 sejumlah 138 perkara sehingga keseluruhan berjumlah 124.626 perkara pidana dan dalam persentase penyelesaiannya mencapai 99,90%. Sedangkan untuk perkara perdata, telah berhasil menyelesaikan 1.736 perkara dari 1.759 perkara perdata yang masuk ditambah sisa perkara tahun 2024 sejumlah 439 perkara sehingga keseluruhan berjumlah 2198 perkara perdata dan penyelesaiannya mencapai 80,02%. Berikut matriks keadaan perkara pidana dan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus dalam tahun 2025.

- **Keadaan Perkara Tingkat Pertama**

No.	Jenis Perkara	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah	Cabut	Putus	Sisa
1	Gugatan	346	749	1095	140	749	327
2	Permohonan	48	958	1006	48	948	58
3	Gugatan Sederhana	3	39	42	10	38	4
4	Perlawanan (Derden Verzet)	13	2	14	0	1	14
5	Konsinyasi	29	11	40	0	1	39
6	Pidana Biasa	138	676	814	0	693	121
7	Pidana singkat	0	0	0	0	0	0
8	Pidana Lalu Lintas/Tilang	0	123.499	123.499	0	123.499	0
9	Pidana Cepat	0	295	295	0	295	0
10	Pidana Praperadilan	0	9	9	0	9	0
11	Pidana anak	0	9	9	0	9	0

Berikut adalah data keadaan perkara yang mengajukan upaya hukum. Data yang disajikan adalah data upaya hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali yang menjadi sisa di tahun 2024 dan juga data upaya hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali yang diajukan dan diproses di tahun 2025

- **Keadaan Perkara Tingkat Banding**

No.	Jenis Perkara	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah	Putus	Sisa
1	Perdata	35	176	211	203	8
2	Pidana	2	34	36	24	12
3	Pidana Anak	0	1	1	1	0

- **Keadaan Perkara Tingkat Kasasi**

No.	Jenis Perkara	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah	Putus	Sisa
1.	Perdata	15	125	140	103	37
2.	Pidana	0	17	17	13	4
3.	Pidana Anak	0	1	1	1	0

- **Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali**

No.	Jenis Perkara	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah	Putus	Sisa
1.	Perdata	18	40	58	24	34
2.	Pidana	0	7	7	7	0
3.	Pidana Anak	0	1	1	0	1

B. PENYELESAIAN PERKARA

- **Penyelesaian Perkara yang Diputus Tepat Waktu**

Jumlah perkara yang diputus dan disajikan adalah data perkara yang masuk, diputus dan diselesaikan secara tepat waktu di tahun 2025.

No.	Jenis Perkara	Perkara Masuk Tahun 2025	Yang Diputus Tepat Waktu	Persentase (%)
1	Gugatan	749	423	56,47
2	Permohonan	958	902	94,15
3	Gugatan Sederhana	39	35	89,74
4	Perlawanan (Derden Verzet)	2	1	50,00
5	Konsinyasi	11	1	0,90
6	Pidana Biasa	676	561	82,98
7	Pidana singkat	0	0	0
8	Pidana Lalu Lintas/Tilang	123.499	123.499	100,00
9	Pidana Cepat	295	295	100,00
10	Pidana Praperadilan	9	9	100,00
11	Pidana anak	9	9	100,00

- **Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali (PK)**

No.	Jenis Perkara	Putus PN	Tidak Banding	Putus PT	Tidak Kasasi	Putus MA	Tidak PK
1.	Perdata	720	679	155	674	29	720
2.	Pidana	693	658	34	686	1	0
3.	Pidana Anak	9	8	1	8	1	0

- **Jumlah Perkara yang Berhasil Diselesaikan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)**

No.	Jumlah Perkara Pidana	Jumlah Perkara Pidana yang Melalui Restorative Justice	Jumlah Perkara Berhasil Restorative Justice	Jumlah Perkara Gagal Restorative Justice
1.	694	0	0	0

- **Jumlah Perkara yang Perdata yang Berhasil Dimediasi**

No.	Jumlah Perkara Perdata	Jumlah Perkara Mediasi	Jumlah Mediasi Berhasil	Jumlah Mediasi Gagal	Jumlah Mediasi Dicabut
1.	1759	740	67	348	10

- **Jumlah Perkara Pidana Anak yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi (*Restorative Justice* dalam perkara anak)**

No.	Jumlah Perkara Anak	Jumlah Perkara Anak yang Melalui Diversi	Jumlah Perkara Diversi Berhasil	Jumlah Perkara Diversi Gagal
1.	9	1	0	1

- **Jumlah perkara Perdata yang menggunakan e-Court**

No.	Jumlah Perkara Perdata	Jumlah Perkara Perdata menggunakan e-Court	Jumlah Perkara Perdata tidak menggunakan e-Court	Persentase (%)
1.	1727	1727	0	100

- **Jumlah perkara Pidana yang Dilimpahkan secara Elektronik(e-Berpadu)**

No.	Jumlah Perkara Pidana	Jumlah Perkara Pidana menggunakan e-Berpadu	Jumlah Perkara Pidana tidak menggunakan e-Berpadu	Persentase (%)
1.	685	685	0	100

- **Layanan perkara Pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)**

No.	Jumlah Perkara Pidana	Jumlah Perkara Pidana menggunakan e-Berpadu	Jumlah Perkara Pidana tidak menggunakan e-Berpadu	Persentase (%)
1.	694	694	694	100

B. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

- **Posbakum (Pos Bantuan Hukum)**

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus berkewajiban untuk menyediakan jasa Pos Bantuan Hukum, atau biasa dikenal dengan Posbakum. Sebagaimana ketentuan yang termuat dalam Pasal 1 ayat 6 peraturan tersebut, Posbakum pada Pengadilan adalah layanan yang dibentuk dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan jasa layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dari segi anggaran, pengadaan jasa Posbakum di seluruh Pengadilan baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, maupun Pengadilan Tata Usaha Negara bersumber dari Anggaran Belanja Negara (APBN).

Pada Pengadilan Negeri, anggaran pengadaan jasa Posbakum disalurkan melalui Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum yang diperoleh dari DIPA Nomor 005.03.2.099065/2025 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus menerima anggaran pengadaan jasa Posbakum dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 72.000.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah) yang diperuntukan untuk Layanan Petugas Piket dengan perhitungan 1 Orang x 3 Jam Layanan x 20 Hari x 12 Bulan.

Penyelenggaraan pengadaan jasa Posbakum di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus pada tahun 2025 dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termuat Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.



Pengumuman Pengadaan Jasa Posbakum Tahun 2025

Berdasarkan hasil seleksi pengadaan jasa Posbakum tahun 2025 adalah ditunjuknya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Advokasi & Syariah (YLBHAS), sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan layanan bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan. Salah satu hal penting yang dituntut dalam perjanjian kesepakatan bersama (MoU) antara Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus dengan penyedia jasa tersebut adalah kewajiban untuk mendukung manajemen Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang prima.

Untuk memastikan bahwa lembaga yang ditunjuk telah memenuhi kewajibannya maka kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja lembaga penyelenggara Posbakum pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur selalu dilakukan secara rutin.



Pengumuman Pemenang Pengadaan Jasa Posbakum Tahun 2025



Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama

Kinerja Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Syariah (YLBHAS) sebagai lembaga penyelenggara Posbakum pada tahun 2025, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi oleh Tim adalah sangat baik dengan data sebagai berikut.

No.	Bulan	Jumlah Penerima Layanan	
		2024	2025
1.	Januari	136	189
2.	Februari	163	181
3.	Maret	117	124
4.	April	68	183
5.	Mei	132	200
6.	Juni	165	20

No.	Bulan	Jumlah Penerima Layanan	
		2024	2025
6.	Juli	223	23
7.	Agustus	224	20
8.	September	192	21
9.	Oktober	241	23
10.	November	216	23
11.	Desember	197	22

Jumlah Total Penerima Layanan Sepanjang Tahun 2025 adalah : 1029 orang dan nilai sarapan anggaran adalah sebesar 100%

- **Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu**

Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu merupakan salah satu layanan hukum di Pengadilan, sebagaimana termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus. Pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus tidak ada alokasi dana untuk anggaran Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu.

- **Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)**

Program Nasional Pembaharuan bidang hukum lainnya sebagaiman yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, dan termuat dalam Cetak Biru Pembaharuan MA adalah Program Pembebasan Biaya Perkara. Sebagaimana halnya dengan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) anggaran penyelenggaraan program ini juga bersumber dari Anggaran Belanja Negara (APBN), dan disalurkan kepada seluruh Pengadilan Negeri melalui Progam Peningkatan Manajemen Peradilan Umum yang diperoleh dari DIPA Nomor 005.03.2.099065/2025 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Sasaran utama pemberian bantuan pembebasan biaya perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan yang diberikan kepada orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi sepanjang yang bersangkutan atau mereka memenuhi yarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan tersebut.

Tahun 2025 anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus untuk penyelenggaraan program ini adalah sebesar Rp1.440.000,- (Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), dan sudah direalisasikan sebesar Rp1.243.000,- (Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) atau sebesar 86,38%.

BAB III
SUMBER DAYA MANUSIA
KOMPOSISI SDM BERDASARKAN KEPANGKATAN/GOLONGAN/PENDIDIKAN

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

TAHUN 2025

STRUKTUR ORGANISASI



SUMBER DAYA MANUSIA

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR KELAS IA KHUSUS



Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Pegawai Negeri Sipil



Tanggal 6 Mei 2025.
Ketua melantik dan mengambil sumpah Pegawai Negeri Sipil atas nama Ichsan Cahya Indarta, S.H, Fadya Shafa Fadillah, S.H. Putri Br. Perangin Angin, S.H, Rian Coestilo, S.H.

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR KELAS IA KHUSUS





Tanggal 19 Mei 2025.
Ketua melantik dan mengambil sumpah Ibu Dr. Nenny Yualianny, S.H.,M.Kn sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus.





PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH PANITERA, PANITERA MUDA PIDANA, PANITERA MUDA PERDATA DAN JURUSITA

Pada tahun 2025, Ketua melantik dan mengambil sumpah Bapak Rudy Hartono, S.H.,M.H sebagai Panitera, Bapak Dudi Gusmawan, S.H sebagai Panitera Muda Pidana, Singgih Hariyono, S.H.,M.H sebagai Panitera Muda Perdata dan Bapak Khairil Ihsan, S.T.,M.H serta Bapak Septian Ari Widyantoro, S.H.,M.H sebagai Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur.





SUMBER DAYA MANUSIA



Tanggal 24 Oktober 2025

Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta melantik dan mengambil sumpah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus Bapak Iwan Anggoro Warsita, S.H., M.Hum.

BAB III
SUMBER DAYA MANUSIA
KOMPOSISI BERDASARKAN KEPANGKATAN/ GOLONGAN/PENDIDIKAN

Sumber daya manusia adalah kemampuan daya pikir, dan daya fisik yang dimiliki seorang individu dan berperilaku dipengaruhi oleh keturunan maupun lingkungannya serta bekerja karena termotivasi oleh keinginannya untuk memenuhi kepuasannya. Dalam organisasi segala potensi sumber daya yang dimiliki manusia tersebut memiliki peran yang sangat penting untuk meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi. Berikut adalah keadaan atau kondisi sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus di tahun 2025.

A. KOMPOSISI PEGAWAI

NO	JABATAN	JUMLAH
1	HAKIM	31
2	PEJABAT STRUKTURAL	9
3	PEJABAT FUNGSIONAL	5
4	PANITERA PENGGANTI	26
5	JS DAN JSP	19
6	ANALIS, PENGELOLA, PENGADMINISTRASI	11
7	PPPK	32
8	PTT	30
	JUMLAH	168

B. MUTASI

MUTASI HAKIM /PEGAWAI (MASUK)			
NO.	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	Dr. NENNY YULIANNY, S.H., M.Kn	WAKIL KETUA PN SIDOARJO	WAKIL KETUA PN JAKARTA TIMUR
2	LUCY ERMAWATI, S.H., M.H	HAKIM PN JAKARTA SELATAN	HAKIM PN JAKARTA TIMUR

MUTASI HAKIM /PEGAWAI (MASUK)			
NO.	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
3	YURHANUDIN KONA, S.H	HAKIM PN MAMUJU	HAKIM PN JAKARTA TIMUR
4	MELIA NUR PRATIWI, S.H., M.H	HAKIM PN SOLOK	HAKIM PN JAKARTA TIMUR
5	ICHE PURNAWATY, S.H., M.H	HAKIM PN BOGOR	HAKIM PN JAKARTA TIMUR
6	MATHILDA CHRYSTINA KATARINA, S.H., M.H	HAKIM PN DEPOK	HAKIM PN JAKARTA TIMUR
7	RIA HELPINA, S.H., M.H	HAKIM PN SLEMAN	HAKIM PN JAKARTA TIMUR
8	POPI JULIYANI, S.H., M.H	HAKIM PN SLEMAN	HAKIM PN JAKARTA TIMUR
9	MARIA SORAYA MURNIATY BR SITINJAK, S.H	HAKIM PN LUBUK PAKAM	HAKIM PN JAKARTA TIMUR
10	JUANDRA, S.H., M.H	HAKIM PN PADANG	HAKIM PN JAKARTA TIMUR
11	MURDIAN EKAWATI, S.H., M.H	HAKIM PN WATAMPONE	HAKIM PN JAKARTA TIMUR
12	IRWAN HAMID, S.H., M.H	HAKIM PN TERNATE	HAKIM PN JAKARTA TIMUR
13	DARU SWASTIKA RINI, S.H	HAKIM PN BALE BANDUNG	HAKIM PN JAKARTA TIMUR
14	SAMI ANGGRAENI, S.H., M.H	HAKIM PN TEGAL	HAKIM PN JAKARTA TIMUR
15	ERNI PRILIAWATI, S.H., S.E., M.H	HAKIM PN PATI	HAKIM PN JAKARTA TIMUR
16	ELIZABETH PRASASTI ASMARANI, S.H	HAKIM PN KLATEN	HAKIM PN JAKARTA TIMUR
17	DYAH RETNO YULIARTI, S.H	HAKIM PN SUKOHARJO	HAKIM PN JAKARTA TIMUR

MUTASI HAKIM /PEGAWAI (MASUK)			
NO.	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
18	ENDAH SRI ANDRIYATI, S.H., M.H	WAKIL KETUA PN SENGKANG	HAKIM PN JAKARTA TIMUR
19	HJ. SYOFIA M. TAMBUNAN, S.H	HAKIM PN JAKARTA UTARA	HAKIM PN JAKARTA TIMUR
20	RUDY HARTONO, S.H., M.H	PANITERA PN SIDOARJO	PANITERA PN JAKARTA TIMUR
21	DUDI GUSMAWAN, S.H	PANMUD HUKUM PN CIBINONG	PANMUD PIDANA PN JAKARTA TIMUR
22	SINGGIH HARIYONO, S.H	PANMUD PIDANA PN JAKARTA UTARA	PANMUD PERDATA PN JAKARTA TIMUR
23	MUHAMMAD IDRIS HASAN, S.H., M.H	PANITERA PENGGANTI PN BEKASI	PANITERA PENGGANTI PN JAKARTA TIMUR
24	EDWARD WILLY, S.H	PANITERA PENGGANTI PN JAKARTA PUSAT	PANITERA PENGGANTI PN JAKARTA TIMUR
25	DHENY INDARTO, S.E	PANITERA PENGGANTI PN JAKARTA PUSAT	PANITERA PENGGANTI PN JAKARTA TIMUR
26	EKO BUDIARNO, S.H	PANITERA PENGGANTI PN JAKARTA PUSAT	PANITERA PENGGANTI PN JAKARTA TIMUR
27	KHAIRUDDIN, S.H	PANITERA PENGGANTI PN JAKARTA PUSAT	PANITERA PENGGANTI PN JAKARTA TIMUR
28	KOMAR,S.H	PANITERA PENGGANTI PN JAKARTA SELATAN	PANITERA PENGGANTI PN JAKARTA TIMUR
29	HENDRA GUNAWAN, S.H	PANITERA PENGGANTI PN JAKARTA UTARA	PANITERA PENGGANTI PN JAKARTA TIMUR
30	LENE, S.H	PANITERA PENGGANTI PN JAKARTA BARAT	PANITERA PENGGANTI PN JAKARTA TIMUR
31	RADIUS HADIWIJAYA, S.H	JURUSITA PN BEKASI	PANITERA PENGGANTI PN JAKARTA TIMUR
32	DIMAS ARIYANTO,S.H	JURUSITA PN JAKARTA PUSAT	PANITERA PENGGANTI PN JAKARTA TIMUR

MUTASI HAKIM /PEGAWAI (KELUAR)			
NO.	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	RIYONO, S.H.,M.H	HAKIM PN JAKARTA TIMUR	HAKIM PN SIDOARJO
2	SAID HUSEIN, S.H.,M.H	HAKIM PN JAKARTA TIMUR	HAKIM PN TANGERANG
3	DONY DORTMUND, S.H.,M.H	HAKIM PN JAKARTA TIMUR	HAKIM PN TANGERANG
4	GATOT ARDIAN AGUSTRIONO, S.H.,Sp.N	HAKIM PN JAKARTA TIMUR	HAKIM PN BANDUNG
5	HERBERT HAREFA,S.H.,M.H	HAKIM PN JAKARTA TIMUR	HAKIM PN MAKASSAR
6	ARDI,S.H.,M.H	HAKIM PN JAKARTA TIMUR	HAKIM PN BANDUNG
7	WIYONO,S.H	HAKIM PN JAKARTA TIMUR	HAKIM PN SEMARANG
8	NYOMAN SUHARTA,S.H	HAKIM PN JAKARTA TIMUR	HAKIM PN SIDOARJO
9	DODDY HENDRASAKTI,S.H	HAKIM PN JAKARTA TIMUR	HAKIM PN SIDOARJO
10	ABDUL ROPIK,S.H	HAKIM PN JAKARTA TIMUR	HAKIM PN SURAKARTA
11	PURWADI,S.H	PANMUD PIDANA PN JAKARTA TIMUR	PANMUD PHI PN BANDUNG
12	ROMU SANTA MANGADAR, S.H.,M.H	PANITERA PENGGANTI PN JAKARTA TIMUR	PANITERA PENGGANTI PN JAKARTA UTARA
13	HELENI FAERIATI, S.H	PANITERA PENGGANTI PN JAKARTA TIMUR	PANITERA PENGGANTI PN JAKARTA BARAT
14	ROLAND TUNGGUH, S.H	PANITERA PENGGANTI PN JAKARTA TIMUR	PANITERA PENGGANTI PN JAKARTA BARAT
15	ZULFIKRI, S.H	PANITERA PENGGANTI PN JAKARTA TIMUR	PANITERA PENGGANTI PN JAKARTA UTARA

MUTASI HAKIM /PEGAWAI (KELUAR)			
NO.	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
16	VICTOR A. RISAKOTTA, A.Md	PANITERA PENGGANTI PN JAKARTA TIMUR	PANITERA PENGGANTI PN JAKARTA SELATAN
17	FITRI WAHYUNI ARIGAYO, S.H.,M.H	PANITERA PENGGANTI PN JAKARTA TIMUR	PANITERA PENGGANTI PN JAKARTA PUSAT
18	MAULANA MUHAMAD, S.H	JURUSITA PN JAKARTA TIMUR	JURUSITA PN JAKARTA PUSAT
19	TRI SETYO ADI NUGROHO, S.E	JURUSITA PN JAKARTA TIMUR	JURUSITA PN JAKARTA SELATAN
20	TRISNO WIDODO, S.H	JURUSITA PN JAKARTA TIMUR	JURUSITA PN BOGOR



C. PROMOSI MASUK DAN KELUAR

PROMOSI KELUAR HAKIM /PEGAWAI			
NO.	**Nama**	**Jabatan Lama**	**Jabatan Baru**
1	IKHWAN HENDRATO, S.H.,M.H	KETUA PN JAKARTA TIMUR	HAKIM TINGGI PT TANJUNG KARANG
2	DARIUS NAFTALI, S.H.,M.H	WAKIL KETUA PN JAKARTA TIMUR	KETUA PN JAKARTA TIMUR
3	CHITTA CAHYANINGTYAS, S.H.,M.H	HAKIM PN JAKARTA TIMUR	HAKIM TINGGI PT AMBON
4	TRI YULIANI, S.H.,M.H	HAKIM PN JAKARTA TIMUR	HAKIM TINGGI PT AMBON
5	BAMBANG JOKO WINANRNO, S.H.,M.H	HAKIM PN JAKARTA TIMUR	HAKIM TINGGI PT SULAWESI TENGGARA
6	FRANCISCUS XAVERIUS HERUSANTOSO, S.H.,M.H	HAKIM PN JAKARTA TIMUR	HAKIM TINGGI PT KUPANG
7	NI WAYAN WIRAWATI, S.H.,M.Si	HAKIM PN JAKARTA TIMUR	WAKIL KETUA PN JEMBER
8	MARLIN SIMANJUNTAK, S.H.,M.H	PANITERA PN JAKARTA TIMUR	PANITERA PT KALIMANTAN UTARA
9	CIK AKIP, S.H.,M.H	PANMUD PERDATA PN JAKARTA TIMUR	PANITERA PENGGANTI PT BANTEN
10	LENI MARLINA, S.H	JURUSITA PENGGANTI PN JAKARTA TIMUR	PANITERA PENGGANTI PN PANDEGLANG

PROMOSI MASUK HAKIM /PEGAWAI			
NO.	**Nama**	**Jabatan Lama**	**Jabatan Baru**
1	IWAN ANGGORO WARSITA, S.H.,M.Hum	WAKIL KETUA PN JAKARTA BARAT	KETUA PN JAKARTA TIMUR
2	SEPTIAN ARI WIDYANTORO, S.H	JURUSITA PN JAKARTA SELATAN	JURUSITA PN JAKARTA TIMUR
3	KHAIRIL IHSAN, S.T	JURUSITA PN JAKARTA SELATAN	JURUSITA PN JAKARTA TIMUR

D. PENSIUN

PENSIUN HAKIM /PEGAWAI			
NO.	**Nama**	**Jabatan**	**TMT Pensiun**
1	COKORDA GEDE ARTHANA, S.H.,M.H	HAKIM PN JAKARTA TIMUR	28 AGUSTUS 2025
2	MARYATI, S.H.,M.H	PANITERA PENGGANTI PN JAKARTA TIMUR	1 MARET 2025

PENSIUN HAKIM /PEGAWAI			
NO.	**Nama**	**Jabatan**	**TMT Pensiun**
3	LUKMAN HAKIM, S.H	PANITERA PENGGANTI PN JAKARTA TIMUR	11 FEBRUARI 2025
4	SYAHRIZAL	JURUSITA PENGGANTI PN JAKARTA TIMUR	6 FEBRRUARI 2025
5	MARGIYANTO	ANALIS DAN PENGELOLA PN JAKARTA TIMUR	29 JULI 2025
6	RINI KUSTANTI, S.H	PANITERA PENGGANTI PN JAKARTA TIMUR	22 OKTOBER 2025
7	BREMA IMANTHA, S.H	JURUSITA PENGGANTI PN JAKARTA TIMUR	1 JUNI 2025
8	EDWIN KOMARRUDIN, S.H	JURUSITA PENGGANTI PN JAKARTA TIMUR	1 SEPTEMBER 2025
9	ARWAIDI	JURUSITA PENGGANTI PN JAKARTA TIMUR	BELUM ADA PERTEK

E. DIKLAT (SDM TEKNIS/NON TEKNIS YANG MENGIKUTI DIKLAT)

NO.	Jenis Diklat	Nama	Jabatan	Waktu Pelaksanaan
1	PELATIHAN PEMERIKSAAN PERKARA TPPU BAGI HAKIM MAHKAMAH AGUNG RI	• CHRISTINA ENDARWATI, S.H., M.H • RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H., M.H • ARIEF YUDIARTO, SH,.MH • NI WAYAN WIRAWATI, S.H., M.Si	HAKIM	• Tahap 1 : 27 - 31 JANUARI 2025 • TAHAP 2 : 3 - 7 FEBRUARI 2025
2	KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN PERMA TENTANG TATA CARA PENANGANAN PEKARA TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN	• IKHWAN HENDRATO, S.H., M.H.	KETUA PN	10 FEBRUARI 2025
3	KONSIYERING KE-2 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI TENTANG PEDOMAN PEMIDANAAN PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME DAN RENCANA TINDAK LANJUT	• RIYONO, S.H., M.H.	HAKIM	25 FEBRUARI 2025
4	PENYUSUNAN NASKAH KEBIJAKAN TAHUN ANGGARAN 2025 DENGAN JUDUL "KEMANDIRIAN ANGGARAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)	• CHRISTINA ENDARWATI, S.H., M.H.	HAKIM	13 MARET 2025

5	NASKAH URGENSI RANCANGAN PERMA TENTANG PENYELESAIAN EKSEKUSI GUGATAN SEDERHANA	• IKHWAN HENDRATO, S.H.,M.H. • MARLIN SIMANJUNTAK, S.H., M.H.	• HAKIM • PANITERA	24 APRIL 2025
6	ANALISA DAN IDENTIFIKASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP FOREIGEN TERRORIST FIGHTERS (FTF)	• RUDI RAFLI SIREGAR, S.H., M.H.	• HAKIM	2 MEI 2025
7	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN PERADILAN MAHKAMAH AGUNG RI C.Q PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AKAN PENYUSUN NASKAH KEBIJAKAN TAHUN ANGGARAN 2025	• RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H., M.H.	• HAKIM	8 MEI 2025
8	FOCUS GROUP DISCUSSION PERSIAPAN PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA TERORISME	• PURWADI, S.H • MUHAMMAD HABIL	• PANMUD PIDANA • STAF KEPANITERAAN MUDA PIDANA	9 MEI 2025
9	PEMBEKALAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS YUDISIAL	• IKHWAN HENDRATO, S.H., M.H. • Dr. NENNY YULIANNY, S.H., M.Kn. • ARDI, S.H., M.H. • TRI YULIANI, S.H., M.H. • COKORDA GEDE ARTHANA, S.H. • RUDI RAFLI SIREGAR, S.H., M.H. • GATOT ARDIAN AGUSTRIONO, S.H., M.H. • RIYONO, S.H., M.H.	• KETUA • WAKIL KETUA • HAKIM	23 MEI 2025

10		• ABDUL ROPIK, S.H., M.H. • F.X. HERUSANTOSO, S.H., M.H. • HERU KUNTJORO, S.H., M.H. • DAMERIA FRISELLA SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum. • NI MADE PURNAMI, S.H., M.H. • DODDY HENDRASAKTI, S.H. • IMMANUEL, S.H., M.H. • SRI HARTATI, S.H., M.H. • SUBCHI EKO PUTRO, S.H., M.H. • CHITTA CAHYANINGTYAS, S.H., M.H. • NYOMAN SUHARTA, S.H. • WIYONO, S.H. • SAID HUSEIN, S.H., M.H. • MOHAMAD INDARTO, S.H., M.Hum. • DONY DORTMUND, S.H., M.H. • CHRISTINA ENDARWATI, S.H., M.H. • NI WAYAN WIRAWATI, S.H., M.Si. • HERBERT HAREFA, S.H., M.H. • ARIEF YUDIARTO, S.H,.M.H. • RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H., M.H. •		23 MEI 2025
11	UNDANGAN FOCUS GROUP DISCUSSIO (FGD) PENYUSUN PENILAIAN RISIKO NASIONAL TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME, DAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL (NRA TPPU, TPPT, DAN PPSPM) TAHUN 2025	• IMMANUEL,S.H., M.H.	• HAKIM	24 - 25 JUNI 2025

12	MENGIKUTI PELATIHAN LATSAR DASAR (LATSAR) CPNS GOLONGAN II DAN III GELOMBANG 1 TAHUN 2025.	• LAURA SILVIANA, S.H. • MONICA SELLY AGATHA PUTRI, S.H. • IRLIA NANDA NURRAHMADANI, A.Md. • LEADY MARISSA NAPITUPULU, A.Md. • TIARA NURUL ADHANIS, A.Md. • TSABITAH RANA ANJALIA, A.Md.A.P.	• CPNS	30 JUNI 2025 - 9 JULI 2025
13	BIMBINGAN TEKNIS TAHUN ANGGARAN 2025	• IKHWAN HENDRATO, S.H., M.H. • Dr. NENNY YULIANNY, S.H., M.Kn. • DAMERIA FRISELLA SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum. • IMMANUEL, S.H., M.H. • HERU KUNTJORO, S.H., M.H. • SRI HARTATI, S.H.,M.H. • COKORDA GEDE ARTHANA, S.H. • NI MADE PURNAMI, S.H., M.H. • SUBCHI EKO PUTRO, S.H., M.H. • LUCY ERMAWATI, S.H., M.H. • RUDI RAFLI SIREGAR, S.H., M.H. • MOHAMAD INDARTO, S.H., M.Hum. • DARU SWASTIKA RINI, S.H. • CHRISTINA ENDARWATI, S.H., M.H. • NI WAYAN WIRAWATI, S.H., M.Si. • DYAH RETNO YULIARTI, S.H. • ENDAH SRI ANDRIYATI, S.H., M.H. • MARIA SORAYA MURNIATY BR SITINJAK, S.H. • MATHILDA CHRYSTINA KATARINA, S.H.,M.H. • ARIEF YUDIARTO, SH,.MH. • JUANDRA, S.H., M.H. • RIA HELPINA, S.H., M.H. • POPI JULIYANI, S.H., M.H.	• KETUA • WAKIL KETUA • HAKIM	11 JULI 2025

14	BIMBINGAN TEKNIS TAHUN ANGGARAN 2025	• ERNI PRILIAWATI, S.H., S.E., M.H. • ELIZABETH PRASASTI ASMARANI, S.H. • SAMI ANGGRAENI, S.H., M.H. • MURDIAN EKAWATI, S.H., M.H. • RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H., M.H. • IRWAN HAMID, S.H., M.H. • MELIA NUR PRATIWI, S.H., M.H. • YURHANUDIN KONA, S.H • ICHE PURNAWATY, S.H., M.H.	• HAKIM	11 JULI 2025
15	PELATIHAN SINGKAT PENDALAMAN SUBSTANSI DAN KEBARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL (UU NOMOR 1 TAHUN 2024) SELURUH INDONESIA GELOMBANG I	• IKHWAN HENDRATO, S.H., M.H. • Dr. NENNY YULIANNY, S.H., M.Kn. • COKORDA GEDE ARTHANA, S.H. • RUDI RAFLI SIREGAR, S.H., M.H. • DAMERIA FRISELLA SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum. • HERU KUNTJORO, S.H., M.H. • NI MADE PURNAMI, S.H., M.H. • IMMANUEL, S.H., M.H. • MOHAMAD INDARTO, S.H., M.Hum.	• HAKIM	25 - 29 AGUSTUS 2025
16	PELATIHAN SINGKAT PENDALAMAN SUBSTANSI DAN KEBARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL (UU NOMOR 1 TAHUN 2024) SELURUH INDONESIA GELOMBANG II	• SRIHARTATI, S.H.,M.H. • SUBCHI EKO PUTRO, S.H., M.H. • CHRISTINA ENDARWATI, S.H., M.H. • NI WAYAN WIRAWATI, S.H., M.Si. • ARIEF YUDIARTO, SH,.MH. • RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H., M.H. • ENDAH SRI ANDRIYATI, S.H., M.H. • SAMI ANGGRAENI, S.H., M.H. • MATHILDA CHRYSTINA KATARINA, S.H.,M.H. • MARIA SORAYA MURNIATY BR SITINJAK, S.H. • RIA HELPINA, S.H., M.H. • YURHANUDIN KONA, S.H.	• HAKIM	28 AGUSTUS 2025 - 4 SEPTEMBER 2025

17	MENGIKUTI PELATIHAN LATSAR DASAR CPNS GOLONGAN II DAN III GELOMBANG I SECARA KLASIKAL TAHUN 2025	• LAURA SILVIANA, S.H. • MONICA SELLY AGATHA PUTRI, S.H. • IRLIA NANDA NURRAHMADANI, A.Md. • LEADY MARISSA NAPITUPULU, A.Md. • TIARA NURUL ADHANIS, A.Md. • TSABITAH RANA ANJALIA, A.Md.A.P.	• CPNS	9 - 19 SEPTEMBER 2025
18	KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM SECARA BLENDED LEARNING DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA ANGGARAN 2025	• IKHWAN HENDRATO, S.H., M.H.	• KETUA	11 - 12 SEPTEMBER 2025 15 SEPTEMBER 2025 17 SEPTEMBER 2025
19	PELATIHAN TINGKAT LANJUT HAKIM LINGKUNGAN PENANGANAN PERKARA LINGKUNGAN HIDUP YANG BERORIENTASI PADA PEMULIHAN DAN KEADILAN IKLIM	• NI WAYAN WIRAWATI, S.H., M.SI.	• HAKIM	6 - 12 OKTOBER 2025
20	PELATIHAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI	• IRWAN HAMID, S.H., M.H. • ICHE PURNAWATY, S.H., M.H.	• HAKIM	20 - 22 OKTOBER 2025
21	PELATIHAN BERSAMA APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN ANGKATAN II	• CHRISTINA ENDARWATI, S.H., M.H.	• HAKIM	20 - 22 OKTOBER 2025
22	PELATIHAN TEKNIS YUDISIAL PANITERA PENGGANTI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM SELURUH INDONESIA.	• ZULIANA MARO BATUBARA, S.H., M.Kn • NURIFAH AMALIAH, S.H., M.H. • DWI WIDIYART, S.H. • IRMA ROSMAWATI, S.H. • ASIH MUHSIROH, S.H	• PANITERA PENGGANTI	10 - 21 NOVEMBER 2025

23	PELATIHAN "ADVANCED CT RULE OF LAW"	• SYOFIA MARLIANTI TAMBUNAN, S.H. M.H., • HERU KUNTJORO, S.H., M.H. • RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H., M.H.	• HAKIM	17 - 21 NOVEMBER 2025
24	TRAINING OF TRAINER PELATIHAN TEKNIS YUDISIAL PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME,	• SYOFIA • MARLIANTI TAMBUNAN, S.H. M.H.,	• HAKIM	1 - 5 DESEMBER 2025



BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

TAHUN 2025

BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Tahun 2025

No.	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
1	DIPA-005.01.2.097492/2025 BUA	29.079.869.000	28.966.503.445	113.365.555	99,61
2	DIPA 005.03.2.099065/2025 BADILUM	779.385.000	775.226.865	4.158.135	99,47

1. **Program Dukungan Manajemen (DIPA 01)**

Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus pada Tahun Anggaran 2025 mendapat Pagu Definitif untuk DIPA 005.01.2.097492/2025 Badan Urusan Administrasi sebagai berikut :

1. **1. Gaji dan Tunjangan**

Untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai mendapat anggaran sebesar Rp24.490.808.000,- (dua puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh juta delapan ratus delapan ribu rupiah), dengan realisasi sebesar Rp24.380.826.629,- (dua puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) atau sebesar 99,51%, realisasi Anggaran Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai sebagai berikut:

No.	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
1	Gaji Pokok PNS	6.512.313.000	6.499.278.180	13.034.820	99,80
2	Pembulatan gaji PNS	82.000	73.819	8.181	90,02
3	Tunjangan Suami/Istri PNS	466.397.000	464.813.930	1.583.070	99,66
4	Tunjangan Anak PNS	135.982.000	135.941.925	40.075	99.97
5	Tunjangan Struktural PNS	64.750.000	64.750.000	0	100,00
6	Tunjangan Fungsional PNS	294.745.000	294.690.000	55.000	99,98

No.	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
7	Tunjangan PPh PNS	34.454.000	34.298.518	155.482	99,55
8	Tunjangan Beras PNS	291.704.000	290.549.040	1.154.960	99,60
9	Uang Makan PNS	883.919.000	872.108.000	11.811.000	98,66
10	Tunjangan Umum PNS	38.085.000	38.085.000	0	100,00
11	Gaji Pokok PPPK	303.186.000	303.186.000	0	100,00
12	Pembulatan Gaji PPPK	10.000	7.468	2.532	74,68
13	Tunjangan Suami/Istri PPPK	24.530.000	24.520.200	9.800	99,96
14	Tunjangan Anak PPPK	6.557.000	6.547.216	9.784	99,85
15	Tunjangan Beras PPPK	26.950.000	26.940.240	9.760	99,96
16	Tunjangan Uang Makan PPPK	73.324.000	70.744.000	2.580.000	96,48
17	Tunjangan Umum PPPK	22.860.000	22.860.000	0	100,00
	JUMLAH	9.179.848.000	9.149.393.536	30.454.464	99,67

1.2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Untuk Penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan Perkantoran mendapat anggaran sebesar Rp4.394.518.000,- (empat milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus delapan belas ribu rupiah), dengan realisasi sebesar Rp4.391.133.816, - (empat milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus enam belas rupiah), atau sebesar 99,92%. Realisasi Anggaran Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran sebagai berikut :

No.	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
1	Belanja Keperluan Perkantoran	1.551.824.000	1.551.682.222	141.778	99,99
2	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.600.000	2.462.000	138.000	94,69
3	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	86.040.000	86.040.000	0	100

No.	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
4	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	104.610.000	104.602.444	7.556	99,99
5	Belanja Langganan Telepon	500.000	235.484	264.516	47,10
6	Langganan Air	31.980.000	30.102.775	1.877.225	94,13
7	Belanja Sewa	24.321.000	24.320.790	210	100.00
8	Belanja Jasa Lainnya	1.250.000	1.250.000	0	100,00
9	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	919.655.000	919.655.000	0	100,00
10	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	362.613.000	361.884.391	728.609	99,80
11	Pakaian Dinas	114.806.000	114.806.000	0	100,00
12	Pelantikan dan Sumpah Jabatan	1.250.000	1.250.000	0	100,00
13	Koordinasi ke Pusat/ Tingkat Banding/Tingkat Pertama	170.000	170.000	0	100,00
14	Konsultasi ke KPPN/ Kanwil DJPb/KPKNL/ BANK	3.910.000	3.910.000	0	100,00
15	Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim (Sewa Rumah Dinas)	878.850.000	878.850.000	0	100,00
	JUMLAH	4.084.379.000	4.081.221.106	3.157.894	99,92

1.3. Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana mendapat anggaran sebesar Rp193.543.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah), dengan realisasi sebesar Rp193.543.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah), atau sebesar 100%. Realisasi Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana sebagai berikut:

No.	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
1	Belanja penambahan nilai gedung dan bangunan	193.543.000	193.543.000	0	100,00
	JUMLAH	193.543.000	193.543.000	0	100,00

Dari program-program tersebut berikut rekap Realisasi Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus Tahun Anggaran 2025 Pagu Definitif untuk DIPA-005.01.2.097492/2025 :

No.	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
1	Gaji dan Tunjangan	9.179.848.000	9.149.393.536	30.454.464	99,67
2	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	4.084.379.000	4.081.221.106	3.157.894	99,92
3	Belanja penambahan nilai gedung dan bangunan	193.543.000	193.543.000	0	100,00
	JUMLAH	13.457.770.000	13.424.157.642	33.612.358	99,75

2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (DIPA 03)

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Nomor DIPA 005.03.2.099065/2025 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, mendapat Pagu Definitif sebesar Rp779.385.000,- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan realisasi sebesar Rp775.226.865,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua puluh enam ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah), atau sebesar 99,47%. Realisasi Anggaran Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum sebagai berikut :

No.	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
1	Rapat Koordinasi Teknis Penyelesaian Perkara	750.000	750.000	750.000	100,00
2	Pendaftaran Berkas Perkara	519.413.000	519.354.865	58.135	99,99
3	Penetapan hari sidang	900.000	734.000	166.000	81,56
4	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan.	1.800.000	1.696.000	104.000	94,22
5	Pemeriksaan di sidang pengadilan (Konsumsi)	150.480.000	149.667.000	813.000	99,46

No.	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa	%
6	Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	2.700.000	2.488.000	212.000	92,15
7	Minutasi/Upaya hukum	23.000.000	22.050.000	950.000	95,87
8	Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat pertama	3.502.000	2.613.000	889.000	74,61
9	Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama	3.400.000	2.631.000	769.000	77,38
10	Pos Bantuan Hukum	72,000,000	72,000,000	0	100
11	Pembebasan biaya perkara	1.440.000	1.243.000	197.000	86,32
	JUMLAH	707.385.000	703.226.865	4.908.135	99,41

B. PENGELOLAAN SARANA PRASARANA

1. Fasilitas Gedung

Gedung kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus berkedudukan di Jalan Dr. Sumarno No.1, Penggilingan Jakarta Timur mulai dibangun tahun 2008 di atas tanah seluas 6.458 m². Gedung terdiri dari 5 lantai dengan 1 basement dimana luas keseluruhan mencapai + 7864 m². Fasilitas gedung yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus adalah Gedung Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus yang ditempati sekarang ini diresmikan pada tanggal 11 Januari 2012, oleh Bapak H. A. Arifin Tumpa, SH. MH. selaku Ketua Mahkamah Agung. Status tanah Hak Pakai dengan pemegang hak atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan rincian sebagai berikut :

Lantai 1 terdiri dari :

- Ruang PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
- Ruang Informasi
- Ruang Posbakum (Pos Bantuan Hukum)
- Loket BTN
- Ruang Workspace
- Ruang Tamu Terbuka
- Ruang Kesehatan
- Ruang Toilet Disabilitas
- Ruang Toilet Pria dan Wanita
- Ruang Dharmayukti
- Ruang Pers
- Ruang Sidang Koesoemah Atmadja
- Ruang Sidang Purwoto
- Ruang Sidang Mudjono
- Ruang Sidang Oemar Seno Adji;
- Ruang Sidang R. Soebekti
- Ruang Sidang Ali Said
- Ruang Sidang Wirjono
- Ruang Sidang Soerjadi
- Ruang Sidang Anak
- Ruang Mediasi
- Ruang Laktasi
- Ruang Kaukus
- Ruang Perpustakaan
- Ruang Pantry
- Ruang Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan
- Ruang Server
- Ruang Media Center
- Ruang Tunggu Jaksa
- Ruang Tunggu Penasehat Hukum

Lantai 2 terdiri dari :

- Ruang Tamu Terbuka
- Ruang Kerja Ketua
- Ruang Rapat Media Center
- Ruang Kerja Wakil Ketua
- Ruang Kerja Panitera
- Ruang Kerja Sekretaris
- Ruang Kerja Hakim
- Ruang Jurusita
- Ruang Kerja Kepaniteraan Perdata
- Ruang Kerja Kepaniteraan Pidana
- Ruang Kerja Kepaniteraan Hukum
- Musholla
- Toilet Pria dan Wanita

Lantai 3 terdiri dari :

- Ruang Kerja Kepala Bagian Umum
- Ruang Kerja Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
- Ruang Kerja Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan
- Ruang Panitera Pengganti
- Ruang Arsip Kepaniteraan Muda Hukum
- Toilet Pria dan Wanita

Lantai Basemen terdiri dari :

- Gudang Persediaan ATK DIPA-01 dan DIPA-03
- Ruang Tahanan Pria dan Wanita
- Tempat Parkir

Selain lantai-lantai yang telah difungsikan tersebut, masih terdapat lantai 4 (empat) dan lantai 5 (lima) gedung Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus yang belum selesai dibangun, dan untuk memenuhi kebutuhan akan ruang penyimpanan dokumen perkara non aktif (arsip) maka lantai 4 (empat) dimanfaatkan sementara sebagai ruang arsip perkara non aktif.

Usulan pembangunan lanjutan lantai 4 (empat) dan lantai 5 (lima) gedung Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus tersebut telah disampaikan setiap tahun kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun belum dikabulkan karena adanya kebijakan terkait pembangunan gedung bagi satuan kerja yang baru akan dibentuk.

2. Pemeliharaan Gedung/Bangunan dan Sarana Prasarana

Kegiatan pemeliharaan gedung/bangunan dan sarana prasarana Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus tahun 2025 sebagai berikut :

1. perbaikan backdrop lobby depan
2. perbaikan lantai lobby depan
3. perbaikan toilet lobby depan
4. perbaikan ruang kesehatan
5. perbaikan ruang tamu terbuka
6. perbaikan ruang kepegawaian
7. perbaikan lampu ruang panitera pengganti
8. perbaikan lampu ruang sidang
9. perbaikan ruang media center lobby belakang
10. perbaikan pipa pdam
11. perbaikan pipa air bersih
12. perbaikan pompa air bersih
13. perbaikan satelit pompa air












3. Fasilitas Sarana dan Prasarana Penunjang

- **Kendaraan Dinas Roda Dua (Motor)**

No.	Merk	Nomor Polisi	Kondisi
1	Honda	B 6803 AQ	Rusak Berat
2	Honda	B 6343 TQA	Rusak Berat
3	Honda	B 8930 VL	Rusak Berat
4	Honda	B 6380 TQA	Rusak Berat
5	Honda Tiger	B 6087 TQB	Rusak Berat
6	Yamaha	B 6086 TQB	Rusak Berat
7	Yamaha	B 1392 TQN	Baik
8	Yamaha	B 6802 AQ	Baik
9	Yamaha	B 6290 JQ	Baik

- **Kendaraan Dinas Roda Empat (Mobil)**

No.	Merk	Nomor Polisi	Kondisi
1	Grand Livina	B 1375 PQN	Baik
2	Toyota New Vios	B 8636 WU	Baik
3	Toyota	B 2098 JQ	Baik
4	Toyota	B 6085 TQB	Rusak Ringan
5	Toyota	B 2142 PQ	Baik

- **Sarana Prasarana lainnya sesuai daftar inventaris**

No.	Nama	Kuantitas	Kondisi
1	Kursi Besi/Metal	303	Baik
2	Meja Kerja Kayu	270	Baik
3	P.C Unit	94	Baik
4	Kursi Kayu	89	Baik
5	Lemari Kayu	74	Baik
6	Bangku Panjang Kayu	62	Baik
7	Printer (Peralatan Personal Komputer)	54	Baik
8	A.C. Split	36	Baik
9	Monografi	32	Baik
10	Rak Besi	28	Baik
11	Filing Cabinet Besi	27	Baik
12	Lemari Besi/Metal	26	Baik

No.	Nama	Kuantitas	Kondisi
13	Sice	24	Baik
14	Filing Cabinet Kayu	22	Baik
15	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	19	Baik
16	Tiang Bendera	17	Baik
17	LCD Monitor	15	Baik
18	Rak Kayu	14	Baik
19	Kipas Angin	14	Baik
20	Loudspeaker	14	Baik
21	Bangku Panjang Besi/Metal	10	Baik
22	TV Monitor	9	Baik
23	Microphone	8	Baik
24	Palu Sidang	8	Baik
25	Lambang Garuda Pancasila	6	Baik
26	Uninterruptible Power Supply (UPS)	5	Baik
27	Pesawat Telephone	5	Baik
28	Bracket Standing Peralatan	4	Baik
29	White Board	4	Baik
30	CCTV - Camera Control Television System	4	Baik
31	Meja Komputer	4	Baik
32	Laptop	3	Baik
33	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lainnya	3	Baik
34	Meja Rapat	3	Baik
35	Kursi Fiber Glas/Plastik	3	Baik
36	Server	2	Baik
37	Amplifier	2	Baik
38	Sound System	2	Baik
39	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2	Baik
40	Serial Scanner/Printer	2	Baik
41	Bangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus	2	Baik
42	Dispenser	2	Baik
43	Partisi	2	Baik
44	External/Portable Hardisk	2	Baik

No.	Nama	Kuantitas	Kondisi
45	Personal Computer	2	Baik
46	Atlas	2	Baik
47	LCD Projector/Infocus	1	Baik
48	Jam Elektronik	1	Baik
49	Mixer	1	Baik
50	Kendaraan Bermotor Penumpang Lainnya	1	Baik
51	Stationary Generating Set	1	Baik
52	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1	Baik
53	A.C. Window	1	Baik
54	Mesin Antrian	1	Baik
55	Bangunan Rumah Genset	1	Baik
56	Audio Mixing Console	1	Baik
57	Peralatan Komputer Lainnya	1	Baik
58	Meja Resepsionis	1	Baik
59	Tanah Bangunan Gedung Kantor Pengadilan	1	Baik
60	Rak Server	1	Baik
61	Perkakas Kantor Lainnya	1	Baik
62	Laser Print Finger Detector	1	Baik
63	Video Conference	1	Baik
64	Sedan	1	Baik
65	Mimbar/Podium	1	Baik
66	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	1	Baik
67	CCTV - Camera Control Television System	28	Rusak Ringan
68	Filing Cabinet Besi	19	Rusak Ringan
69	Laptop	17	Rusak Ringan
70	Printer (Peralatan Personal Komputer)	9	Rusak Ringan
71	Microphone	6	Rusak Ringan
72	Acces Point	5	Rusak Ringan
73	External/Portable Hardisk	3	Rusak Ringan
74	Rak Kayu	3	Rusak Ringan

No.	Nama	Kuantitas	Kondisi
75	Mini Komputer	3	Rusak Ringan
76	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	Rusak Ringan
77	Router	1	Rusak Ringan
78	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	Rusak Ringan
79	Server	1	Rusak Ringan
80	Hub	1	Rusak Ringan
81	Sepeda Motor	6	Rusak Berat
82	White Board	1	Rusak Berat
84	Kursi Kayu	1	Rusak Berat

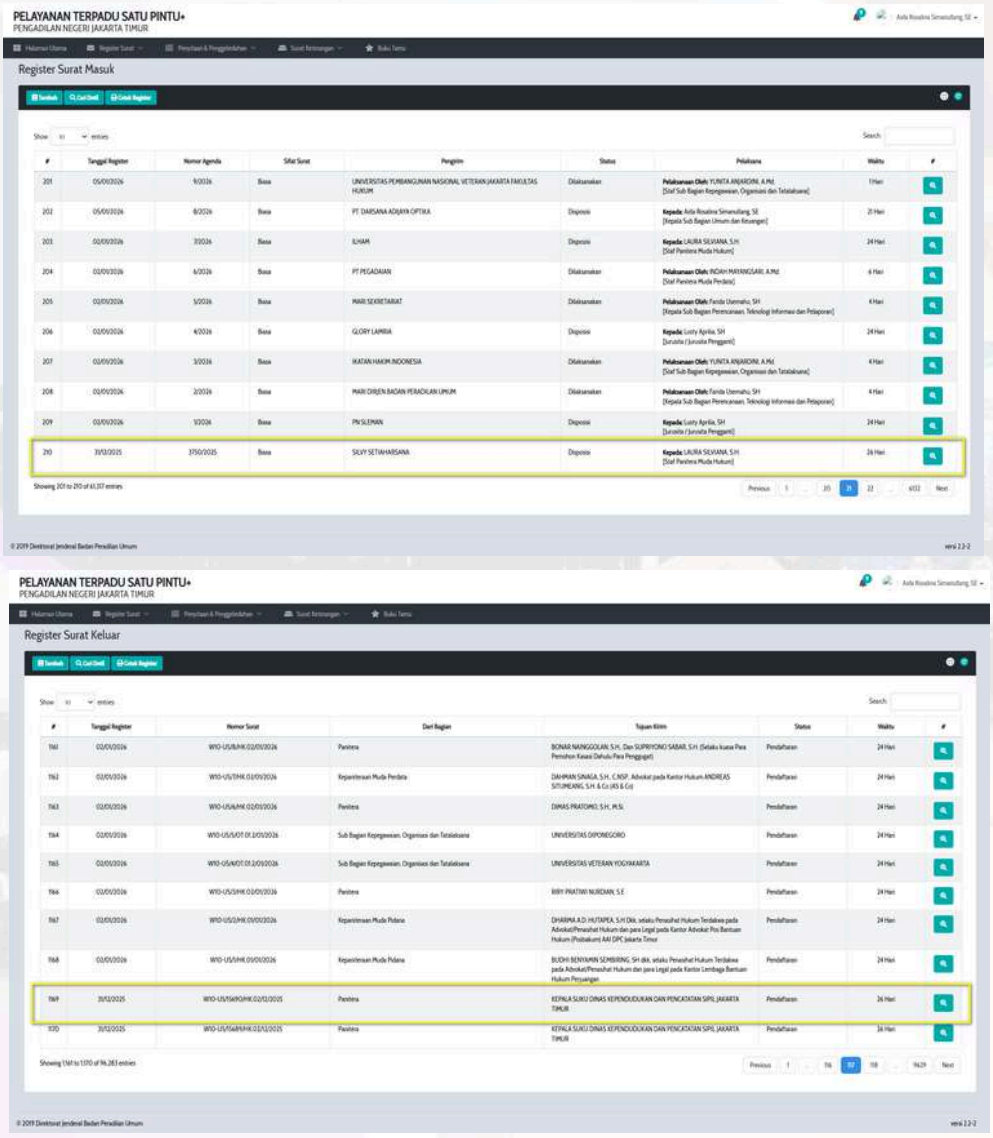
4. Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang Tahun 2025

Belanja modal dari DIPA Tahun 2025 untuk pengadaan peralatan dan mesin berupa 1 unit Dispenser dengan anggaran sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

No.	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Persentase (%)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	700.000	700.000	0	100
Jumlah		**700.000**	**700.000**	**0**	**100**

5. Pengelolaan Administrasi Umum/Persuratan

Pengelolaan tata persuratan pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus dilakukan secara eletronik melalui aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Plus. Pencatatan/registrasi persuratan baik yang masuk maupun yang keluar diinput ke dalam menu (e-surat) dengan jumlah penerimaan surat masuk tercatat sebanyak 3.750 surat dan jumlah surat keluar sebanyak 15.690 surat.



Tampilan Aplikasi Persuratan (PTSP+)

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

1. Implementasi e-Court dan e-Litigasi Tahun 2025

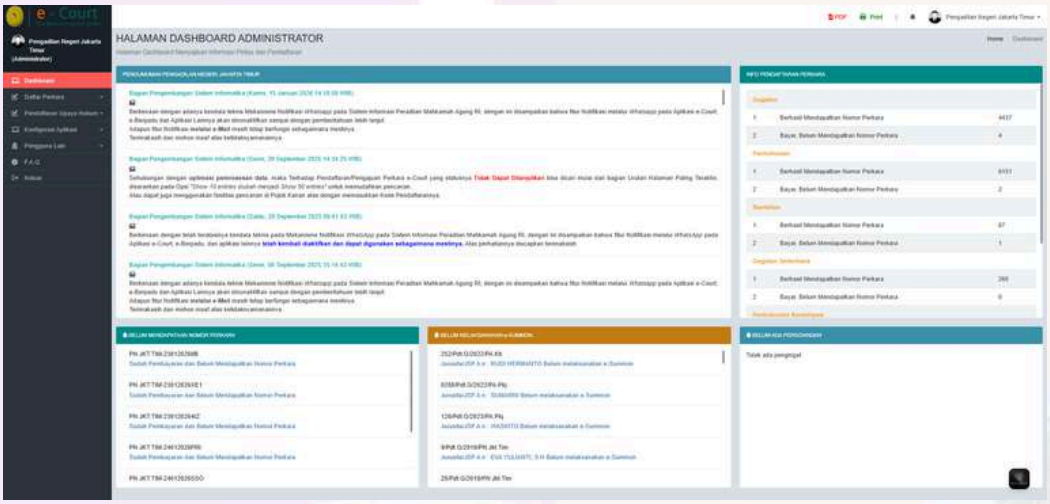
Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi di pengadilan secara elektronik pada tanggal 29 Maret 2018, merupakan hal yang dilakukan untuk memenuhi asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan adanya layanan sistem *e-court* di pengadilan diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam berperkara dan juga demi terwujudnya lembaga peradilan yang modern.

Pada tanggal 6 Agustus 2019, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan MA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Dengan peraturan tersebut proses persidangan dilakukan secara elektronik melalui e-litigasi yang diberlakukan untuk perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, tata usaha negara.

Pemberlakuan e-litigasi untuk persidangan di tingkat pertama juga diikuti dengan pemanfaatan *e-court* untuk upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali terhadap perkara yang menggunakan e-litigasi pada tingkat pertama. Untuk memenuhi Perma Nomor 1 Tahun 2019 Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus telah menjalankan ketentuan tersebut. Pendaftaran Perkara Perdata melalui *e-court* di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 telah mencapai 100%.

Dari pelaksanaan Perma tersebut jumlah perkara yang didaftarkan melalui *e-court* dan *e-litigasi* selama tahun 2025 sebanyak 1.768 perkara.

NO.	PENDAFTARAN PERKARA	JUMLAH
1	Perdata Gugatan	749
2	Perdata Permohonan	958
3	Perdata Gugatan Sederhana	39
4	Perdata Bantahan/Perlawanan	2
Jumlah		**1.768**
PERKARA E-LITIGASI		**1.768**



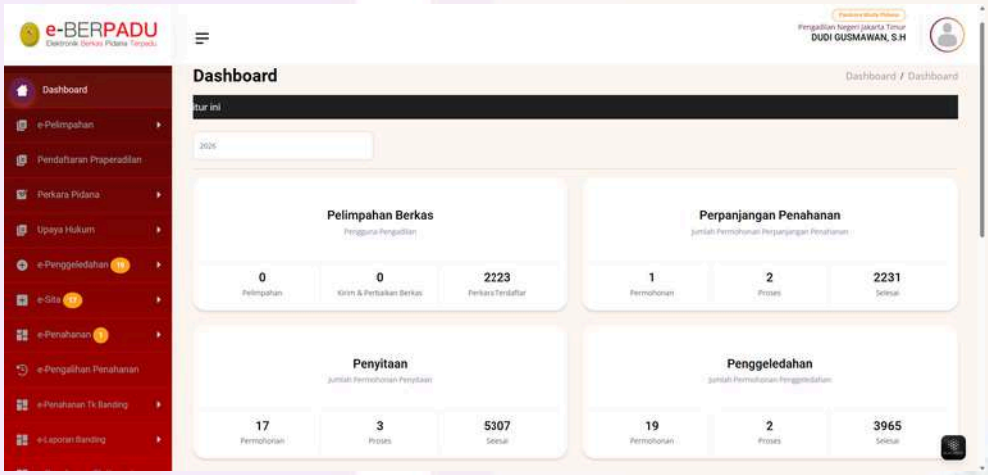
Tampilan Aplikasi e-*Court*

2. Implementasi e-Berpadu

Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah aplikasi yang mengintegrasikan berkas perkara pidana antar aparat penegak hukum. Penegak hukum yang dimaksud adalah Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantas Korupsi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Aplikasi e-Berpadu hadir untuk mewujudkan digitalisasi administrasi perkara pidana guna memangkas prosedur panjang birokrasi sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi layanan perkara pidana yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan. Beberapa fitu yang dapat digunakan pada aplikasi e-Berpadu adalah sebagai berikut :

1. Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik
2. Pengajuan Penetapan Izin atau Persetujuan Penggeledahan
3. Pengajuan Penetapan Izin atau Penyitaan
4. Pengajuan Perpanjangan Penahanan
5. Penangguhan Penahanan
6. Permohonan Pembantaran Penahanan
7. Permohonan Penetapan Diversi
8. Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti
9. Permohonan Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan
10. Pendaftaran Praperadilan Elektronik
11. Permohonan Izin Keluar Tahanan
12. Permohonan Pengalihan Penahanan
13. Permohonan Penangguhan Penahanan

Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus sudah menerapkan e-Berpadu dengan jumlah pendaftaran perkara yaitu sejumlah 685 perkara dengan rincian 676 perkara pidana biasa dan 9 perkara pidana anak.



Tampilan Aplikasi *e-Berpadu*

3. Implementasi SIPP

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi berbasis web yang digunakan oleh aparatur pengadilan dalam proses perkara dan administrasinya, serta dapat digunakan sebagai media monitoring bagi Pimpinan untuk memonitor kinerja hakim, panitera pengganti dan bagian kepaniteraan. Selain itu, aplikasi ini juga menyediakan informasi perkara kepada masyarakat meliputi nomor perkara, tanggal perkara, pihak yang terlibat, status perkara, dan biaya perkara yang memudahkan masyarakat pencari informasi perkara untuk meng*update* informasi perkaranya dengan mudah, cepat dan berbiaya ringan.

Selama tahun 2025 aplikasi SIPP mengalami 4 (empat) kali pembaharuan versi yaitu versi 5.6.5, 5.6.6, 6.0.0, dan 6.0.1. Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelaas IA Khusus telah melakukan pembaharuan tersebut sesuai dengan instruksi Badilum.

Dengan format SIPP versi dari 5.6.5, terdapat fitur – fitur baru yaitu:

Release Note

Versi : 5.6.5

No	Versi	Deskripsi
1	5.6.5	Umum & Agama: Pemberitahuan Memori & Kontra Memori pada Keberatan GS dapat diisi Hari Libur.
2	5.6.5	Umum, Agama & TUN:Menampilkan Tag (e-Court) pada Perkara Kasasi.
3	5.6.5	Perbaikan pada Form Register Kasasi bagian Alamat.
4	5.6.5	Perbaikan pada fitur ePayment Generate VA pada Aplikasi SIPP.
5	5.6.5	Umum :Penambahan hak akses Panmud PHI, Meja I PHI, Meja II PHI dan Meja III PHI untuk Verzet PHI.
6	5.6.5	Umum :Perbaikan pihak not found pada verzet PHI.
7	5.6.5	Umum, Jinayat & Militer:Perbaikan register kasasi pada kolom pihak Terdakwa yang diputus bebas.
8	5.6.5	Umum, Jinayat & Militer:Penambahan Fitur Upaya Hukum Banding Pidana secara elektronik (eBerpadu Banding).
9	5.6.5	Umum & Agama:Penambahan Fitur Register Induk Permohonan Restitusi.
10	5.6.5	Umum & Agama:Penambahan Fitur Register Induk Permohonan Kompensasi.
11	5.6.5	Perbaikan Bundel A+B Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK).
12	5.6.5	Agama:Penambahan Fitur Perkara Bantahan (Pdt.Bth) pada Register Perdata.

Dengan format SIPP versi dari 5.6.6, terdapat fitur – fitur baru yaitu:

Release Note

Versi : 5.6.6

No	Versi	Deskripsi
1	5.6.6	Perbaikan edit data umum.
2	5.6.6	Perbaikan tab detil banding.
3	5.6.6	Perbaikan template akta banding.
4	5.6.6	Perbaikan detil Register Peninjauan Kembali (PK).

Dengan format SIPP versi dari 6.0.0, terdapat fitur – fitur baru yaitu:

Release Note

Versi : 6.0.0

No	Versi	Deskripsi
1	6.0.0	4 Lingkungan Peradilan : Penambahan Fitur Smart Majelis
2	6.0.0	4 Lingkungan Peradilan : Penambahan Notifikasi/Pesan apabila Terjadi Kegagalan Pengiriman Data Kasasi/PK
3	6.0.0	4 Lingkungan Peradilan : Perbaikan pada Perekaman dan Menampilkan Data Tanggal Surat Pengantar Upaya Hukum Banding
4	6.0.0	4 Lingkungan Peradilan : Penambahan Fitur Menurunkan Dokumen Renvoi Salinan Putusan Upaya Hukum Kasasi/PK
5	6.0.0	4 Lingkungan Peradilan : Perbaikan pada Saat Merekam dan Menyimpan Data Tanggal TMS PK di App SIPP (muncul Pesan Error tanggal TMS tidak boleh kurang dari tanggal Permohonan PK)
6	6.0.0	4 Lingkungan Peradilan : Perbaikan pada Saat Pengajuan PK Kedua (dan Seterusnya), dapat Mengajukan PK Kedua (dan seterusnya) terhadap Pengajuan PK yang Sebelumnya Telah Dicabut ataupun Berstatus TMS
7	6.0.0	4 Lingkungan Peradilan : Perbaikan Status Perkara jika TMS dan jika Dilakukan Pencabutan Upaya Hukum PK
8	6.0.0	4 Lingkungan Peradilan : Perbaikan pada bagian Tab Kasasi/PK pada Halaman Detil Perkara Tingkat Pertama
9	6.0.0	4 Lingkungan Peradilan : Perbaikan pada Notifikasi/Pesan terhadap Data Tanggal Peminjaman dan Pengembalian Arsip
10	6.0.0	4 Lingkungan Peradilan : Perbaikan pada Tombol Kirim Data Upaya Hukum Kasasi-PK pada Aplikasi SIPP wajib Mengunggah File Surat Pengantar
11	6.0.0	3 Lingkungan Peradilan (Umum, Agama, TUN) : Perbaikan pada Jurnal Eksekusi ketika terdapat Upaya Hukum PK pada saat Pengajuan Eksekusi
12	6.0.0	3 Lingkungan Peradilan (Umum, Agama, TUN) : Menampilkan Kembali tag e-Court pada Aplikasi SIPP Apabila Terdapat Perubahan Format Nomor Perkara
13	6.0.0	3 Lingkungan Peradilan (Umum, Agama, TUN) : Perbaikan fitur Upload e-doc Relaas Panggilan pada Aplikasi SIPP
14	6.0.0	3 Lingkungan Peradilan (Umum, Agama, TUN) : Penambahan Kolom Perlimbangan Hukum pada Link Tautan Cabut perkara Perdata
15	6.0.0	3 Lingkungan Peradilan (Umum, Agama, TUN) : Integrasi Data Putusan Verzet (Mengirim Data) dari SIPP ke e-Court
16	6.0.0	3 Lingkungan Peradilan (Umum, Agama, TUN) : Perbaikan Generate Virtual Account Biaya Kasasi dan Biaya PK pada Aplikasi SIPP
17	6.0.0	3 Lingkungan Peradilan (Umum, Militer, Mahkamah Syariah) : Saat merekam data Putusan dengan Vonis Bebas maka akan tersimpan juga ke Riwayat Penahanan berupa Tidak Ditahan oleh Hakim PH dan Status Penahanan akan menjadi Tidak Ditahan
18	6.0.0	3 Lingkungan Peradilan (Umum, Militer, Mahkamah Syariah) : Penambahan Notifikasi/Pesan apabila terdapat Perbedaan Nama Pihak antara SIPP dengan e-Berpadu pada saat Menegister Upaya Hukum Banding
19	6.0.0	3 Lingkungan Peradilan (Umum, Militer, Mahkamah Syariah) : Perbaikan dengan Menghilangkan Notifikasi/Pesan pada Halaman Detil Banding yang terdapat peringatan Perpanjangan Penahanan (Laporan Kasasi) belum diinput
20	6.0.0	3 Lingkungan Peradilan (Umum, Militer, Mahkamah Syariah) : Penambahan fitur Perekaman Data Perkara yang Memenuhi Kriteria Restorative Justice
21	6.0.0	3 Lingkungan Peradilan (Umum, Militer, Mahkamah Syariah) : Pada Halaman Register/List Perkara telah Ditambahkan Pencarian Detil terhadap Perkara dengan Kriteria Restorative Justice
22	6.0.0	3 Lingkungan Peradilan (Umum, Militer, Mahkamah Syariah) : Perbaikan Metode Sinkronisasi Data Penahanan Kasasi/PK
23	6.0.0	3 Lingkungan Peradilan (Umum, Militer, Mahkamah Syariah) : Penambahan Dokumen Pernyataan Kelengkapan Berkas pada Bundel A Upaya Hukum Banding
24	6.0.0	3 Lingkungan Peradilan (Umum, Militer, Mahkamah Syariah) : Optimalisasi Halaman Register Penahanan Pidana Umum dan Pidana Khusus dengan Menampilkan Status Penahanannya dan Perbaikan Pagingnya
25	6.0.0	3 Lingkungan Peradilan (Umum, Militer, Mahkamah Syariah) : Perbaikan pada fitur Perekaman Data Pemberitahuan Putusan, ketika Tombol Simpan Diklik setelah Mengisi Data Minutasi menyebabkan Hilangnnya Data Tanggal dan e-Doc Resi yang Sudah Tersimpan
26	6.0.0	3 Lingkungan Peradilan (Umum, Militer, Mahkamah Syariah) : Menambahkan fitur verifikasi data pihak antara SIPP dan eBerpadu
27	6.0.0	Peradilan Umum : Perbaikan Hak Akses untuk Merekam Data pada Register Restitusi dan Kompensasi
28	6.0.0	Peradilan Umum : Perbaikan untuk Mengecek/Mendeteksi Nomor Perkara Pasca Pailit pada Halaman Pendaftaran Perkara yang Berasal dari e-Court
29	6.0.0	Peradilan Umum : Perbaikan Hak Akses Panmud Hiaga untuk Merekam Data BHT pada Semua Perkara Pasca Pailit
30	6.0.0	Peradilan Umum : Perbaikan pada Data Verzet saat Merekam Data Sumber Hukum Verzet
31	6.0.0	Peradilan Umum : Perbaikan pada Data Diversi pada Bagian Nomor Urut, Tahun dan Format Penomoran Perkara
32	6.0.0	Peradilan Umum : Perbaikan Generate Nomor pada Register Eksekusi EPSK
33	6.0.0	Peradilan Umum : Penambahan Referensi KUA
34	6.0.0	Peradilan Agama : Penambahan Perekaman Data Ruang Sidang dan Edit Penetapan Hari Sidang Ikrar Talak

Dengan format SIPP versi dari 6.0.1, terdapat fitur – fitur baru yaitu:

Release Note

Versi : 6.0.1

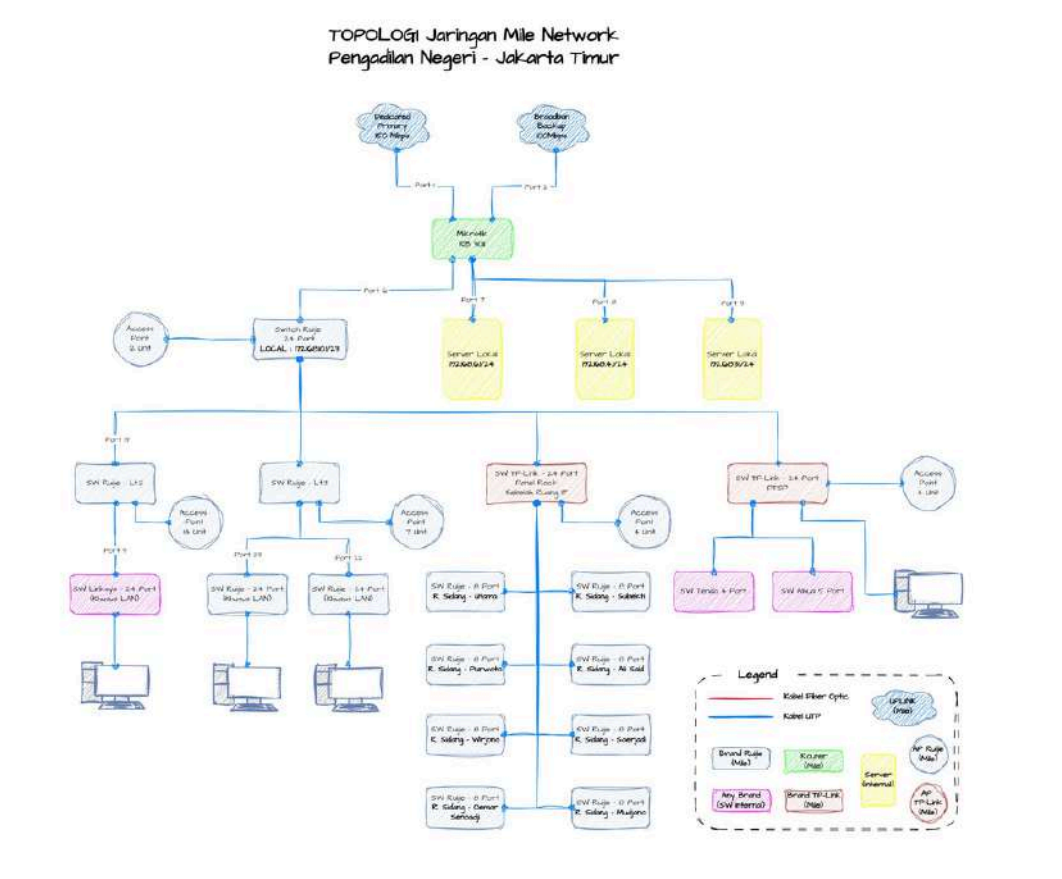
No	Versi	Deskripsi
1	6.0.1	Seluruh Lingkungan Peradilan : Penambahan Fitur Smart Majelis
2	6.0.1	Seluruh Lingkungan Peradilan : Laporan Statistik Smart Majelis
3	6.0.1	Seluruh Lingkungan Peradilan : Format Jam pada Tunda dan Edit Jadwal Sidang (h -> H)

Dengan adanya aplikasi SIPP bertujuan untuk memudahkan para pencari keadilan dan masyarakat yang memerlukan perkembangan informasi perkara yang ditangani oleh pengadilan dimana salah satunya adalah memasukkan data perkara dengan tepat waktu dan akurat. Berdasarkan aplikasi Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) untuk periode Januari s.d. Desember tahun 2025, Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus meraih implementasi SIPP senilai **964 (96,2%)** atau berada diurutan ketiga (3) dari 5 (lima) kategori wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jakarta.

#	JUMLAH PERKARA	KELAS	PENGADILAN	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	IMPLEMENTASI SIPP
5	>2000	IA Khusus	Pengadilan Negeri Jakarta Utara	91.59%	96.27%	99.66%	99.74%	★★★★ 96.82% (968)
5	>2000	IA Khusus	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	92.36%	95.64%	99.92%	99.03%	★★★★ 96.74% (965)
5	>2000	IA Khusus	Pengadilan Negeri Jakarta Timur	90.21%	96.41%	99.1%	99.06%	★★★★ 96.2% (964)
5	>2000	IA Khusus	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	91.51%	95.95%	97.69%	98.58%	★★★★ 95.93% (961)
5	>2000	IA Khusus	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	94.35%	92.76%	93.57%	92.57%	★★★★ 93.31% (929)

4. Topologi Jaringan

Dalam rangka mendukung kelancaran proses kinerja, telah disediakan jaringan internet menggunakan kecepatan sebesar 150 Mbps dengan topologi jaringan sebagai berikut :



Topologi Jaringan

5. Perangkat Teknologi Informasi

Dalam rangka mendukung kelancaran proses kinerja organisasi, telah disediakan perangkat pendukung teknologi informasi dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Merk	Jumlah
1	Acces Point	GIGABIT	5
2	External/ Portable Hardisk	Hardisk WD (Western Digital)	1
		WD My Book-8TBS	4
3	Hub	Hub 5 port POE	1
4	Mini Komputer	Mini PC BOX NUC8i7BNH (Termasuk HDMI & Keyboard)	3

No.	Nama Barang	Merk	Jumlah
5	Laptop	Laptop Lenovo V130	1
		Lenovo	2
		Lenovo Ideapad G400	12
		Axioo Mybook Pro K3 (8N5-BW)	5
6	P.C Unit	-	18
		Dell	5
		Dell Optiplex 3090MT	11
		HP	2
		HP AIO 200 G3	16
		HP AIO Pro One 600 G5	4
		HP Desktop AIO 510	6
		HP Pavilion P6230L	3
		HP PC 24-DF1010D AIO	3
		HP PROONE 600 G6 AIO	1
		HP.Pavillion Omni 220-10D	12
		P.C Dell All in1	3
		PC Dekstop ACER Veriton X2680G	10
7	Peralatan Komputer Lainnya	STAND BOX KIOSK	1
8	Printer	-	10
		Canon	6
		Canon G2000	5
		Canon type G2010	3
		Epson	3
		Epson L2310	10
		Epson Printer L4260	10
		HP Deskjet 1112	5
		HP Smart Tank 615	2
		Laserjet M12W	7
		Printer HP Laserjet PRO P1102W (CE658A)	2

No.	Nama Barang	Merk	Jumlah
9	Rak Server	Lemari Rack Close Asterix	1
10	Router	Router Microtik RB 1100AHX2	1
11	Scanner	-	1
		Brother	5
		Epson Workforce DS-1630	18
		HP	5
		HP Scanjet Pro	11
		Panasonic	2
		Plustek	1
		Plustek PS283	5
		Scanner Fujitsu FID-ADFFIU2	2
12	Server	Fujitsu TX1330M3	1
		Fujitsu TX1330M4	1
		HP ML150 G6 E5502	1

BAB V
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

TAHUN 2025

FASILITAS PELAYANAN PUBLIK
RAMAH DIFABEL



KEGIATAN BIMBINGAN,
DAN
PELATIHAN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2025



PELATIHAN PELAYANAN PRIMA BAGI PETUGAS PTSP

Tanggal 10 Januari 2025
Kegiatan pelatihan pengenalan dan pengoperasian aplikasi SIMBADA sebagai media penyimpanan data yang dapat mempermudah pencarian dokumen yang sudah disimpan dengan cepat dan dapat digunakan sebagai penunjang layanan publik pada PTSP.

SOSIALISASI PENERAPAN ECOURT BAGI PETUGAS PTSP

Tanggal 25 Juli 2025
Telah dilaksanakan sosialisasi penerapan e-court bagi petugas PTSP demi meningkatkan layanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam melayani pendaftaran perkaira melalui aplikasi e-Court.





PELATIHAN PELAYANAN PRIMA BAGI PETUGAS PTSP

Tanggal 25 Juli 2025
Upaya peningkatan ketrampilan dan kecakapan pelayanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pntu (PTSP). Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus bekerjasama dengan Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Bekasi melakukan kegiatan kursus singkat tentang Pelayanan Prima (*Service Excellent*), dan juga tentang pedoman etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas.

BAB V
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. INDEKS KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN

Penyelenggaraan survey terhadap pelayanan publik dilakukan melalui aplikasi survey Si-Super pada setiap hari kerja. Survey yang dilakukan melalui aplikasi adalah survey terkait kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan, survey persepsi anti korupsi atas perilaku yang ditunjukkkan oleh pemberi/petugas layanan, survey persepsi kualitas pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus, dan survey harian terhadap pelayanan publik. Hasil evaluasi yang diperoleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus di tahun 2025 berdasarkan data pada aplikasi Si-Super adalah sebagai berikut :

Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025)









Hasil Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Tahun 2025









Hasil Survey Zona Integritas Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) Tahun 2025









B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus diresmikan pada tanggal 3 Mei 2018, oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Bapak Dr. H. Heri Swantoro., S.H., M.H. Pembangunan ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan bentuk pemenuhan dari Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/HM02.3/2/2018, tentang Pedoman Pelayanan Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.



Sejak didirikan tahun 2018 sampai dengan saat ini Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus mengalami banyak perubahan dan perkembangan. Perubahan tersebut tidak terlepas dari tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik, selain itu perubahan tersebut juga diakibatkan oleh adanya kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sendiri. Perubahan yang terjadi di tahun 2025 dilakukan untuk mengikuti ketentuan sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024, tanggal 29 Januari 2024 tentang Pembaharuan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri. Poin-poin perubahan pada ketentuan tersebut antara lain adalah :

- Mengacu pada check list yang tersedia pada standar Sertifikasi AMPUH
- Jam layanan PTSP dibuka selambat-lambatnya 30 menit dari jam kerja pengadilan
- Jam layanan PTSP ditutup secepat-cepatnya 30 menit dari jam kerja pengadilan, dan
- Meja PTSP sebaiknya ditempatkan di lobby yang menghadap pintu masuk (jika memungkinkan).



PTSP Tahun 2018



PTSP Tahun 2024



PTSP Tahun 2025



Duta Pelayanan





Bank dan Posbakum



CCTV Pengawasan PTSP

Sarana prasarana pendukung Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus saat ini terdiri dari :

- Layanan Kepaniteraan Hukum, Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Perdata (termasuk meja Ecourt dan Inzage), dan Tata Usaha
- Nomor antrian
- Brosur
- Fasilitas untuk golongan masyarakat golongan rentan (difabel, lansia, dan ibu hamil/menyusui)
- Layanan kasir
- Layanan Bank
- Posbakum
- Air minum gratis bagi pengunjung
- Hadiah konpensasi pelayanan
- CCTV sebagai salah satu fasilitas monitoring. CCTV ruang PTSP dapat diakses oleh Pimpinan, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan Dirjen Badilum
- Perangkat tablet bagi pengunjung untuk melakukan pengisian survey
- Aplikasi penunjang pelaksanaan tugas pelayanan diantaranya PTSP+, Eraterang, SiSuper

Petugas pelayanan pada PTSP terdiri dari :

- Petugas *front office* (meja pelayanan depan). Mempunyai tugas untuk melayani secara langsung tamu atau pengguna layanan yang membutuhkan pelayanan, dan
- Petugas *back office* (meja pelayanan belakang). Mempunyai tugas untuk membantu dan mendukung petugas *front office* (meja pelayanan depan), dan
- Duta pelayanan, berperan penting untuk mendukung pelayanan Petugas PTSP yang bertugas untuk memberikan pelayanan informasi secara langsung.

Kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah Surat Dirjen Nomor 2154/DJU/KP3.1.2/XI/2024, tanggal 14 November 2024, perihal Penempatan Sumber Daya Manusia pada PTSP. Salah satu ketentuan dalam surat tersebut adalah **dalam rangka peningkatan pelayanan publik, transparansi, dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), maka setiap jasa dari mitra kerja tidak diperbolehkan untuk ditempatkan di tempat-tempat yang vital antara lain sebagai petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan pengerjaan administrasi perkara (pendaftaran s/d pengarsipan perkara).**

Ketentuan tersebut masih belum dapat dipenuhi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus karena keterbatasan sumber daya manusia. Namun demikian untuk memastikan bahwa sumber daya manusia yang dimanfaatkan mampu untuk bersikap profesional, memiliki integritas, dan mematuhi kode etik sebagai petugas layanan publik, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus melakukan kegiatan pengembangan kuliatas SDM melalui program pelatihan pelayanan prima (*service excellent*), pelatihan dasar-dasar pelayanan terhadap kaum rentan (difabel, lansia, dan ibu hamil/menyusui), serta secara konsisten melakukan kegiatan briefing pagi bagi petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).



BRIEFING PAGI

Rutinitas pagi sebelum jam pelayanan adalah pengarahan singkat bagi petugas yang dilaksanakan secara rutin setiap hari kerja.

PELATIHAN PENGOPERASIAN APLIKASI PENDUKUNG PELAYANAN

Pelatihan bagi Petugas pelayanan PTSP, dan Petugas Sidang untuk menggunakan aplikasi pelayanan berbasis eletronik/Teknologi Informasi





PELATIHAN PENGOPERASIAN APLIKASI PELAYANAN

Pelatihan bagi Petugas pelayanan PTSP tentang standar pelayanan prima bagi Masyarakat pengguna layanan.

PENGAWASAN PTSP

Kegiatan Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang secara berkala setiap minggu dan dilaporkan (satu) kali dalam sebulan.



Disamping sarana prasarana, sumber daya manusia, proses manajemen pelayanan, faktor penting lainnya untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai standar yang ditetapkan dan untuk mendeteksi berbagai permasalahan yang muncul adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilakukan secara rutin setiap harinya oleh penanggung jawab layanan PTSP yang bertugas dimuat dalam laporan Penangung Jawab Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

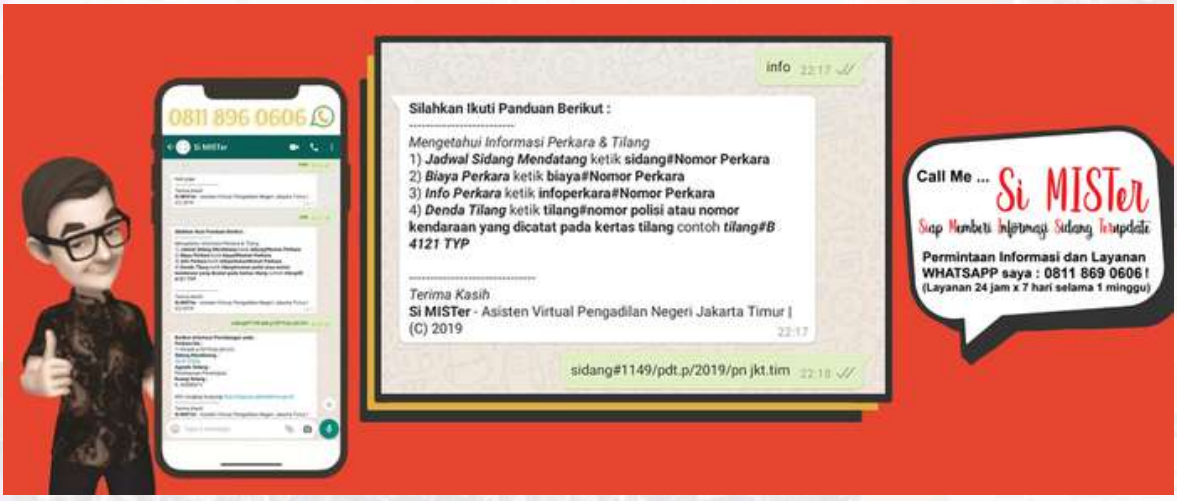
C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Mahkamah Agung dalam rencana pembangunan jangka panjang (*blue print* Pembaharuan Peradilan 2020-2035) telah menetapkan rencana pembaharuan peradilan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Sejalan dengan hal tersebut maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2025, telah menetapkan tujuan untuk melakukan Penyederhanaan proses penanganan perkara, dan memaksimalkan penyelenggaraan administrasi perkantoran melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Dalam upaya memenuhi tujuan tersebut maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus sepanjang tahun 2025 telah mengembangkan beberapa inovasi pelayanan publik, dan inovasi internal. Inovasi yang dikembangkan tidak hanya dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik semata, namun juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja internal organisasi.

Inovasi-inovasi berbasis teknologi informasi yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus dan dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan publik diantaranya adalah :

1. SI MISTER



***Virtual Assisten* Si MISTer**
(Siap Memberi Informasi Sidang Terupdate)

- Si MISTer, adalah aplikasi berbasis pesan melalui *Whatsup*, yang berfungsi sebagai asisten virtual dalam memberikan informasi secara cepat kepada masyarakat pengguna layanan.
- Aplikasi ini telah dipergunakan sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini.
- Sudah disosialisasikan kepada masyarakat pengguna layanan secara luas baik melalui website resmi Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus, media sosial, dan TV *display player* pada PTSP.
- Jenis informasi yang disajikan adalah info perkara, jadwal sidang, biaya perkara, dan denda Tilang.
- Mekanisme penggunaan aplikasi ini sangat sederhana. Pengguna cukup mendaftarkan diri melalui nomor layanan Si MISTer, dan mengikuti langkah-langkah pendaftaran yang ditampilkan.
- Kelemahan aplikasi ini adalah belum dapat menyajikan secara *real time* data jumlah pengguna layanan aplikasi tersebut.

2. E TILANG



E - TILANG
(Elektronik Informasi Tilang)

- E-Tilang, adalah inovasi berbasis berbasis website yang menyajikan informasi tentag perkara tilang secara real time kepada para pelanggar.
- Aplikasi ini telah dipergunakan sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini.
- Sudah disosialisasikan kepada masyarakat pengguna layanan secara luas baik melalui website resmi Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus, media sosial, dan TV display playe pada PTSP.
- Jenis informasi yang disajikan adalah jumlah denda tilang yang harus dibayarkan oleh pelanggan, dengan adanya aplikasi ini maka pengguna tidak perlu lagi mendatangi kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus untuk mendapatkan informasi besaran denda. Selain itu adanya aplikasi ini diharapkan dapat membantu meminimalisir penggunaan jasa calo tilang.
- Kelemahan aplikasi ini adalah apabila data pada Sistem Penulusuran Perkara (SIPP) tidak diinput secara tertib maka data tidak dapat disajikan.

3. SIMANTAN





SIMANTAN
Sistem Informasi Masyarakat Rentan

- SIMANTAN, adalah aplikasi berbasis website yang dikembangkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan kemudian direplikasi oleh seluruh Pengadilan di wilayah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
- Aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan akses bagi masyarakat golongan rentan (difabel, lansia, ibu hamil/menyusui) untuk mendapatkan layanan prioritas dengan mudah, tanpa biaya, aman, dan terjangkau.
- Aplikasi ini menjadi pelengkap sarana prasarana pelayanan bagi masyarakat rentan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus

4. KLIK-PNJAKTIM



KLIK-PNJAKTIM
(Kanal Informasi Publik PN. Jakarta Timur)

- KLIK-PNJAKTIM adalah inovasi berbasis website yang menyajikan daftar informasi publik yang dapat diterima oleh pemohon informasi dan menyediakan fitur pengajuan informasi publik secara online melalui form permohonan yang telah disediakan.
- Aplikasi ini bertujuan untuk memberikan informasi publik yang dapat dimohonkan dan diajukan oleh masyarakat sesuai dengan daftar informasi publik yang sudah dikategorikan pada website KLIK-PNJAKTIM.
- Inovasi ini merupakan bentuk konkrit pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi (PPID) pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus dengan menyediakan informasi visi, misi, struktur organisasi, tugas, fungsi, tanggung jawab PPID beserta standar pelayanan.
- Inovasi ini di tahun 2025 disempurnakan dengan menambahkan informasi-informasi terkait Daftar Informasi yang Dikecualikan, SOP pendukung layanan informasi publik, dan formulir pengajuan permintaan informasi yang dapat diakses secara online.

4. SIANJANI



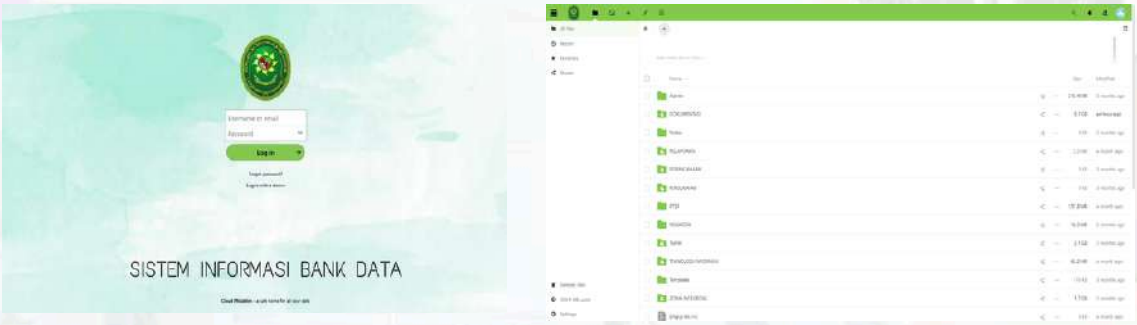
SIANJANI
(Sistem antrian dan jadwal sidang mandiri)

- SiAnjani adalah inovasi yang menyajikan fitur pendaftaran kehadiran para pihak yang berperkara.

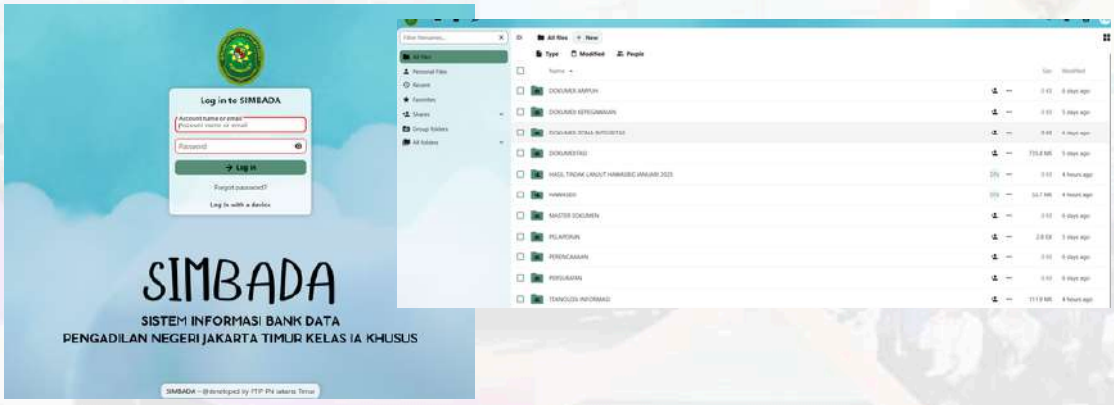
- Aplikasi ini bertujuan untuk mememudahkan para pihak dalam melakukan pelaporan kehadiran persidangan, dan memberikan kemudahan bagi Majelis Hakim dalam mengontrol kegiatan persidangan.
- Inovasi ini telh dibangun sejak tahun 2021, namun tidak berjalan sebagaimana mestinya karena kurangnya kegiatan sosialisasi dan internalisasi program secara berkala kepada para pengguna terutama Majelis Hakim.
- Di tahun 2025 inovasi ini kembali dimanfaatkan dan dikembangkan kembali sebagai proyek perubahan Sekretaris dalam diklat Pimpinan Pengadilan.
- Pemanfaatan aplikasi ini diharapkan mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi persidangan,

Selain inovasi-inovasi eksternal tersebut, inovasi lain berbasis teknologi informasi yang dikembangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja organisasi di tahun 2025 diantaranya adalah :

1. SIMBADA



SIMBADA (Sistem Informasi Bank Data) sebelum dikembangkan

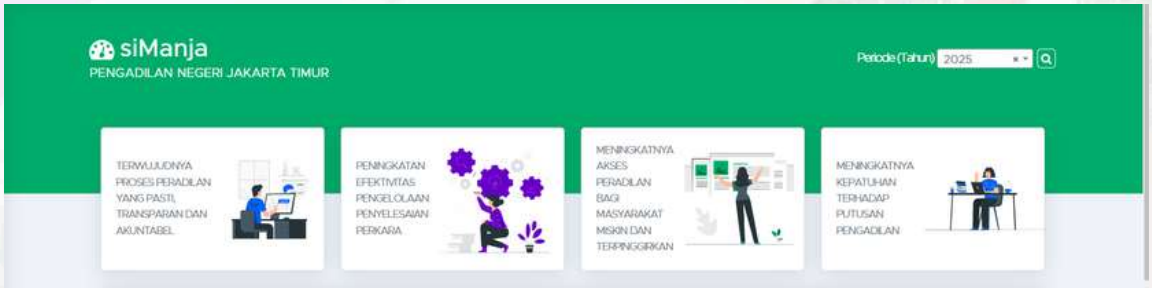


SIMBADA (Sistem Informasi Bank Data) setelah dikembangkan

- Simbada merupakan aplikasi media penyimpanan data berbasis website yang dapat digunakan oleh aparatur Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus. Aplikasi ini juga dapat digunakan untuk membagikan data baik secara personal maupun grup sehingga sangat membantu dalam proses pengumpulan data.

- Aplikasi ini awalnya hanya dimanfaatkan secara internal organisasi untuk mengelola dokumen-dokumen kegiatan pembangunan Zona Integritas (ZI), dan Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) dahulu Akreditasi Penjaminan Mutu (APM), namun dengan fitur baru yang dikembangkan aplikasi ini memungkinkan user/pengguna untuk sharing data antar user/pengguna, sehingga membantu Majelis Hakim dalam menyimpan dan membagi data perkara dengan anggota Majelis lainnya.
- Tujuan pembuatan aplikasi ini adalah untuk mengelola data organisasi secara lebih efektif dan efisien.
- Manfaat dari aplikasi ini adalah memberikan kemudahan bagi setiap bagian untuk menyimpan pembahruan data secara mandiri. Tim dokumen dapat memantau proses pembaharuan tersebut dan bahkan dapat melihat riwayat dari file atau dokumen misalnya ketika sebuah file dihapus maka akan terlihat akun yang menghapus file tersebut.

2. SIMANJA



SIMANJA PN JAKARTA TIMUR
(Sistem Informasi Monitoring Capaian Kinerja)

- SIMANJA adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dan kemudian direplikasi oleh seluruh Pengadilan di wilayah Pengadilan Tinggi Jakarta.
- Aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan organisasi dalam melakukan kegiatan pengumpulan, identifikasi, dan melakukan analisa capaian kinerja sesuai dengan indikator kinerja organisasi yang ditargetkan.
- Aplikasi ini terintegrasi dengan aplikasi Sistem Penelusuran Perkara (SIPP) sehingga data capaian kinerja yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.
- Pemanfaatan aplikasi ini baru dijalankan di tahun 2025, meskipun demikian penggunaan aplikasi ini telah memudahkan Pengadilan Negeri JakartaTimur Kelas IA Khusus untuk melakukan monitoring capaian kinerja secara lebih praktis, efektif, efisisen, dan akuntabel.
- Pemanfaatan aplikasi ini diharapkan mampu menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan nilai akuntabilitas organisasi.

BAB VI
PENGAWASAN



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

TAHUN 2025

KEGIATAN PENGAWASAN INTERNAL
TAHUN 2025



PENGAWASAN EKSTERNAL DAN EVALUASI KINERJA TAHUN 2025













BAB VI
PENGAWASAN

A. INTERNAL

Monitoring/pengawasan adalah salah satu tugas pokok manajamen dalam setiap organisasi. Fungsi ini bertujuan untuk memastikan, menjaga, dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan recana dan aturan yang berlaku. Pengawasan dilingkungan peradilan sendiri berpedoman pada Buku IV Tata Laksana Pengawasan Peradilan, Edisi 2007, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007, tentang Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Badan-badan Peradilan Peradilan, merupakan dasar hukum pelaksanaan pengawasan bagi seluruh badan peradilan di Indonesia. Jenis-jenis pengawasan berdasarkan ketentuan tersebut antara lain adalah :

1. Pengawasan Melekat.

Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus. Pengawasan melekat ini dilakukan dalam bentuk pengamatan, evaluasi, monitoring terhadap pelaksanaan tugas harian yang dibebankan kepada staf yang bertugas, apakah telah terpenuhi dengan baik atau tidak. Hasil pengawasan tersebut dituangkan dalam bentuk laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan jobdesk pegawai pada tiap-tiap bagian. Jika ditemukan ketidaksesuaian maka dilakukan peneguran langsung secara lisan.

2. Pengawasan Rutin/Reguler Secara Internal.

Pengawasan Rutin/Reguler adalah : Pengawasan yang dilaksanakan secara rutin oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus, terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pengawasan ini dapat dilakukan secara internal oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus, dan secara eksternal oleh lembaga diluar Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus. Terkait pengawasan secara internal Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menetapkan Hakim Pengawas Bidang. Ketua menunjuk Hakim yang bertugas untuk melakukan pengawasan pada setiap fungsi yang berjalan disetiap bagian. Penunjukan Hakim Pengawas Bidang di tahun 2025 ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua No. 86/KPN.W10-U5/SK.PW1/VI/2025, tanggal 24 Juni 2025.
2. Menyusun Pedoman Pengawasan. Pedoman pengawasan yang disusun bertujuan untuk memastikan bahwa pengawasan internal yang dilakukan oleh setiap bagian berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Secara garis besar mekanisme pengawasan melekat dan rutin internal adalah sebagai berikut :

- Atasan langsung melakukan pengawasan melekat setiap hari dengan cara observasi/pengamatan. Hasil observasi dituangkan dalam laporan monitoring jobdesk/uraian pekerjaan setiap staf setiap bulan, dan dibahas dalam rapat berjenjang perbagian (rapat Sub.Bagian, dan Kepaniteraan Muda).
- Hakim Pengawas Bidang melakukan pengawas secara rutin 1 kali dalam seminggu dan dilaporkan 1 (satu) kali dalam sebulan.
- Temuan permasalahan atau kondisi ketidaksesuaian ditindaklanjuti oleh pemilik temuan dan hasilnya disajikan dalam bentuk Laporan Hasil Tindak Lanjut Temuan Pengawasan Bidang.
- Laporan Hasil Tindak Lanjut Temuan Pengawasan Bidang disampaikan dalam rapat bagian (rapat Kepaniteraan yang dipimpin Panitera, dan rapat Kesektariatan yang dipimpin oleh Sekretaris. Hasil rapat bidang tersebut kemudian disampaikan kepada Wakil Ketua selaku koordinator pengawasan.
- Wakil Ketua kemudiann melakukan monev atas seluruh pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan, dan melakukan monitring evaluasi terhadap tindak lanjut yang dilakukan untuk menyelesaikan temuan-temuan pengawasan bidang.
- Temuan permasalahan atau kondisi ketidaksesuaian yang tidak dapat diselesaikan atau membutuhkan kebijakan pimpinan disampaikan dalam rapat dinas bulanan yang dipimpin Ketua.
- Ketua memimpin rapat dinas bulanan untuk melakukan evaluasi atas seluruh hasil realisasi, dan capaian kinerja beserta permasalahannya.
- Hakim Pengawas Antar Bidang sesuai ketentuan melaksanakan pengawasan antar bidang sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Di Tahun 2025 pelaksanaan arapat antar bidang dilakukan 1 (satu) kali .
- Temuan dalam kegiatan Pengawasan Antar Bidang Program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tanggung (AMPUH) dilaporkan dalam bentuk Laporan Ketidaksesuaian Assesmen (LKA) dan ditindaklanjuti oleh setiap unit pemilik temuan dalam waktu yang ditetapkan .
- Hasil tindak lanjut tersebut dituangkan oleh Tim Pengawas Antar bidang dalam bentuk Laporan Hasil Assemen (LHA) berikut eviden penyelesaian, dan dilaporkan kepada pimpinan.

3. Pengawasan Rutin/Reguler Secara Eksternal

Pengawasan rutin secara eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga diluar Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus, terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pengawasan rutin dapat dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Badan Pemeriksa Keuangan, dan atau Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengawasan rutin eksternal pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus ditahun 2025 adalah sebagai berikut:

- **Pengawasan rutin bulanan secara virtual oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta**

Pengawasan rutin eksternal secara virtual pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus ditahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Tanggal 28 April 2025
2. Tanggal 26 Mei 2025

- **Pengawasan rutin per-semester oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah**

Pengawasan rutin eksternal semester oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah Pengadilan Tinggi Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus ditahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan Semester 1 : Tanggal 24 Juni 2025 - 25 Juni 2025
2. Pengawasan Semester 2 : Tanggal 3 Desember 2025 - 4 Desember 2025

- **Pengawasan Pelaksanaan Program AMPUH oleh Assesor BADILUM**

Pengawasan pelaksanaan program AMPUH pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus di tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2025 melalui aplikasi AMPUH dengan jumlah ketidaksesuaian sebanyak 67 (enam puluh tujuh) poin.

- **Pengawasan oleh Satuan Tugas Khusus Badan Pengawasan**

Pada tahun 2025 satuan tugas khusus Badan Pengawasan melaksanakan pengawasan rutin dengan jadwal pengawasan sebagai berikut :

- Tanggal 14 April - 18 April 2025
- Tanggal 28 April - 2 Mei 2025
- Tanggal 14 Mei - 16 Mei 2025
- Tanggal 26 Mei - 28 Mei 2025
- Tanggal 10 Juni - 13 Juni 2025
- Tanggal 23 Juni 2025 - 26 Juni 2025
- Tanggal 21 Juli - 25 Juli 2025
- Tanggal 20 Agustus - 22 Agustus 2025
- Tanggal 29 September 2025 - 3 Okt 2025

- **Pengawasan Pelaksanaan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.**

Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) merupakan pengendalian yang dirancang untuk memastikan laporan keuangan yang dihasilkan akurat dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Penerapan PIPK sangat penting untuk memastikan pengelolaan keuangan yang akuntabel. PIPK dapat memberikan keyakinan bahwa:

- Seluruh transaksi keuangan telah dicatat sesuai dengan peraturan
- Seluruh transaksi telah dilaksanakan sesuai dengan pembagian kewenangan
- Seluruh sumber daya keuangan telah diamankan dari kerugian

Pelaksanaan kegiatan evaluasi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta selaku Koordinator Wilayah pada tanggal 20 November 2025.

Evaluasi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dilakukan meliputi faktor-faktor sebagai berikut :

LINGKUNGAN PENGENDALIAN

- Integritas, nilai etika, dan perilaku etis
- Kesadaran pimpinan unit kerja atas pengendalian dan
- Komitmen terhadap kompetensi
- Struktur organisasi serta penetapan wewenang dan
- Kebijakan dan praktik yang berkaitan dengan SDM

PENILAIAN RISIKO

- Sasaran unit kerja telah disusun dan dikomunikasikan
- Telah dilakukan penilaian risiko yang meliputi perkiraan
- Adanya mekanisme untuk mengantisipasi

KEGIATAN PENGENDALIAN

- Kebijakan dan prosedur yang dibutuhkan
- Evaluasi atas perbedaan capaian kinerja
- Adanya pemisahan atau pembagian tugas kepada pihak
- Pembatasan akses terhadap dokumen, catatan, asset
- Adanya mekanisme otorisasi dan persetujuan terhadap
- Dokumentasi yang baik atas kegiatan

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

- Sistem menyediakan informasi yang dibutuhkan
- Informasi tersedia bagi orang yang tepat dalam rincian
- Sistem informasi dikembangkan atau diperbaiki dengan
- Unit kerja memastikan dan mengawasi keterlibatan
- Telah disusun rencana pemulihan pusat data utama
- Terdapat komunikasi yang efektif mengenai tugas dan
- Terdapat saluran komunikasi untuk melaporkan adanya
- Adanya respon yang tepat waktu terhadap komunikasi

PEMANTAUAN

- Terdapat mekanisme reviu atas pelaksanaan kegiatan
- Telah diambil tindakan perbaikan terhadap kesalahan
- Terdapat prosedur untuk mendeteksi adanya

Berdasarkan hasil penilaian atas faktor-faktor tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus memperoleh jumlah 49 point, dan total faktor relevan 50 point dengan persentase sebesar 98%. Dengan hasil akhir disimpulkan bahwa Pengendalian intern atas pelaporan keuangan pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah **Efektif .**

B. EVALUASI

1. Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Evaluasi adalah kegiatan/aktivitas yang dilakukan dengan tujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan dari sebuah organisasi dalam menyelenggarakan proses manajemen.Apakah suatu kegiatan, program telah berjalan sebagaimana mestinya sesuai standar yang ditetapkan ataukah masih terdapat ketidaksesuaian antara keduanya. Evaluator terbaik dari sebuah badan publik yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan publik adalah masyarakat pengguna layanan pada badan publik tersebut, dan alat ukur yang dipergunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penyelenggaraan pelayanan sebuah badan publik adalah melalui kegiatan survey.

Penilaian SAKIP Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus tahun 2024 dilakukan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus memperoleh nilai akuntabilitas sebesar 76, 2 Nilai ini jika dibandingkan dengan nilai tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup besar. Perolehan nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja tersebut meskipun belum meperoleh predikat A, namun merupakan peroleh nilai SAKIP tertinggi untuk wilayah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Tahun 2023	Tahun 2024
1	Perencanaan Kinerja	30.00	22.50	23.10
2	Pengukuran Kinerja	30.00	24.00	24.00
3	Pelaporan Kinerja	15.00	9.75	11.70
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	20.00	19.50
Nilai Akuntabilitas Kinerja			76.20	78.30
			BB	BB

3. Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025.

Evaluasi Implemtasi SIPP (EIS) adalah sebuah aplikasi berbasis website yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum) untuk memantau kinerja Pengadilan diseluruh wilayah Indonesia. Evaluasi Implementasi SIPP ini meliputi 4 (empat) kriteria utama yaitu:

Kinerja, dengan unsur :

- Penyelesaian Perkara Tepat Waktu
- Rilis Versi SIPP
- Kesesuaian Kode Satker Nomor Perkara
- Jangka Waktu Pelaksanaan Delegasi Masuk

Kepatuhan, dengan unsur :

- Pendaftaran Perkara
- Pencatatan Barang Bukti
- Penetapan Hakim
- Penetapan Panitera Pengganti
- Penetapan Jurusita/Jurusita Pengganti
- Penetapan Hari Sidang Pertama
- Penginputan Tuntutan
- Penginputan Putusan Akhir
- Penginputan Minutasi
- Pelaksanaan Minutasi
- Penginputan Permohonan Banding
- Penginputan Permohonan Kasasi
- Penginputan Permohonan Peninjauan Kembali
- Pengiriman Berkas Banding
- Pengiriman Berkas Kasasi
- Pengiriman Berkas Peninjauan Kembali
- Pemberitahuan Putusan/Penentapan
- Penginputan Penetapan Majelis/Hakim
- enginputan Penunjukan Panitera Pengganti
- Penginputan Penetapan Hari Sidang
- Penginputan Penetapan Jurusita/Jurusita Pengganti
- Penginputan Data Pelaksanaan Delegasi
- Kepatuhan Penundaan Jadwal Sidang
- Penginputan Penetapan Perpanjangan Penahanan
- Unggah Putusan Akhir
- Tanda Tangan Elektronik Salinan Putusan Perkara Perdata
- Tanda Tangan Elektronik Salinan Putusan Perkara Pidana

Kelengkapan, dengan unsur :

- E-Document Dakwaan/Petitum
- Pencatatan Saksi
- E-Document Tuntutan
- E-Document Putusan Akhir/Penetapan
- Data Lapor Mediasi
- Data Diversi
- Data Nilai Sengketa
- Dokumen Elektronik Berita Acara Sidang
- Dokumen Elektronik Relaas Panggilan Sidang Pertama
- Dokumen Elektronik Rencana Persidangan (*Court Callendar)*
- Dokumen Elektronik Putusan Anonimisasi

Kesesuaian, dengan unsur :

- Agenda Sidang Terakhir
- Tanggal Putusan dan Tanggal Sidang Terakhir
- Publikasi Pihak
- Pelaksanaan BHT
- Penahanan
- Sisa Biaya Perkara Tk Pertama
- Pelaksanaan Sinkronisasi SIPP WEB
- Verifikasi Dokumen Elektronik Elitigasi
- Pelaksanaan Sinkronisasi SIPP ke Data Center MARI
- Pengarsipan Perkara

Berdasarkan hasil Evaluasi Implemtasi SIPP (EIS) Pengdilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus, sepanjang periode bulan Januari s/d Desember Tahun 2025 memperoleh nilai **964 (96,2%)** atau berada diurutan ketiga (3) dari 5 (lima) kategori wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai berikut:

#	JUMLAH PERKARA	KELAS	PENGADILAN	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	IMPLEMENTASI SIPP
5	>2000	IA Khusus	Pengadilan Negeri Jakarta Utara	91.59%	96.27%	99.66%	99.74%	★★★★ 96.82% (968)
5	>2000	IA Khusus	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	92.36%	95.64%	99.92%	99.03%	★★★★ 96.74% (965)
5	>2000	IA Khusus	Pengadilan Negeri Jakarta Timur	90.21%	96.41%	99.1%	99.06%	★★★★ 96.2% (964)
5	>2000	IA Khusus	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	91.51%	95.95%	97.69%	98.58%	★★★★ 95.93% (961)
5	>2000	IA Khusus	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	94.35%	92.76%	93.57%	92.57%	★★★★ 93.31% (929)

#	KATEGORI	NILAI MAKSIMAL	NILAI SATKER	KONVERSI %
1.	Kinerja	135.00	121.79	**90.21**
2.	Kepatuhan	486.00	468.52	**96.40**
3.	Kelengkapan	143.00	141.71	**99.10**
4.	Kesesuaian	235.00	232.85	**99.09**
				96.20

4. Evaluasi Kinerja Internal Tahun 2025

Seluruh hasil pengawasan internal dan eksternal, (pembinaan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta , evaluasi kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, dan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)), yang telah dilakukan di tahun 2025 menjadi bahan evaluasi bagi Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus. Hambatan dan permasalahan yang ditemui dan perlu mendapatkan perhatian antara lain adalah :

- Manajemen pengelolaan perkara. Target perjanjian kinerja yang masih belum dapat terpenuhi indikator diversi menjadi tantangan sendiri bagi organisasi. Perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan tersebut.
- Manajemen pengelolaan sarana dan prasarana (BMN). Perlu dilakukan penghapusan terhadap barang milik negara yang sudah rusak parah, sehingga dapat dilakukan kegiatan pengadaan baru secara masal.
- Manajemen pengawasan, pelaksanaan pengawasan sepanjang tahun 2025 masih belum dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif.
- Sumber daya manusia. kekurangan sumber daya adalah masalah yang dialami oleh hampir semua satuan kerja. Pemanfaatan secara maksimal sumber daya yang tersedia menjadi solusi sementara, namun tidak menyelesaikan masalah secara tuntas.
- Kondisi keterbatasan ruang karena terbengkalainya proses pembangunan lanjutan lantai 4 (empat) dan 5 (lima) gedung Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus.
- Masih rendahnya nilai evaluasi kinerja SIPP. hal ini diakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan dan kedisiplinan user dalam proses penginputan data perkara.
- Belum diperolehnya predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), yang disebabkan oleh belum terciptanya keseragaman pola kerja dan pola pikir pada sumber daya manusia yang ada.
- Belum diperolehnya predikat Unggul dalam program Serfikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Unggul yang disebabkan oleh belum terciptanya keseragaman pola kerja dan pola pikir pada sumber daya manusia yang ada.

BAB VII
PENUTUP

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

TAHUN 2025

BAB VII
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja yang dilaksanakan di Tahun 2025. Maka segala bentuk capaian yang berhasil dicapai, dan kendala yang menjadi faktor penyebab ketidakberhasilan akan menjadi bahan evaluasi bagi Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus untuk menjadi lebih baik. Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kinerja baik teknis perkara maupun administrasi umum telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi program prioritas yang berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai media pelayanan, dan demi terwujudnya lembaga peradilan yang modern.
3. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dilaksanakan demi terwujudnya aparatur yang profesional.
4. Program pengawasan baik internal maupun eksternal dilaksanakan secara berkala demi terwujudnya akuntabilitas kinerja.
5. Evaluasi kinerja diterapkan sebagai upaya tercapainya kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan.
6. Pelaksanaan program Sertifikasi Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH), dan program Zona Integritas adalah upaya perbaikan manajemen mutu administrasi dan pelayanan.

B. REKOMENDASI

Rekomendasi yang disarankan dan diharapkan dapat menjadi solusi atas kondisi Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus antara lain adalah :

1. Perlu adanya pengembangan inovasi dalam rangka peningkatan kinerja sehingga realisasi dan capaian target kineja dapat terwujud secara optimal.
2. Perlunya pemenuhan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana demi terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima.
3. Perlu diadakan kegiatan pendidikan dan pelatihan guna pengembangan kompetensi sumber daya manusia.
4. Perlu diadakannya pelatihan guna peningkatan pemahaman dan kompetensi pengawas.
5. Dokumen evaluasi agar dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas kinerja.
6. Dukungan dan partisipasi aktif dari pimpinan dan seluruh jajaran Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus terhadap pelaksanaan program Sertifikasi Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH), dan program Zona Integritas perlu ditingkatkan.

LAMPIRAN



LAMPIRAN

No.	LAMPIRAN	LINK
1.	SK TIM PENYUSUN LAPORAN KEGIATAN TAHUN 2025	https://drive.google.com/file/d/1cYZYj2KZ9qn5kml8IwTVkOZv4efeJgUD/view?usp=sharing
2.	DOKUMEN KEGIATAN ADMINISTRASI PERKARA DAN ADMINISTRASI UMUM	https://drive.google.com/drive/folders/1IgprOSVTBkY7Mg-D6EjgnorExGNQS8ns



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025

OLEH

TIM PENYUSUN